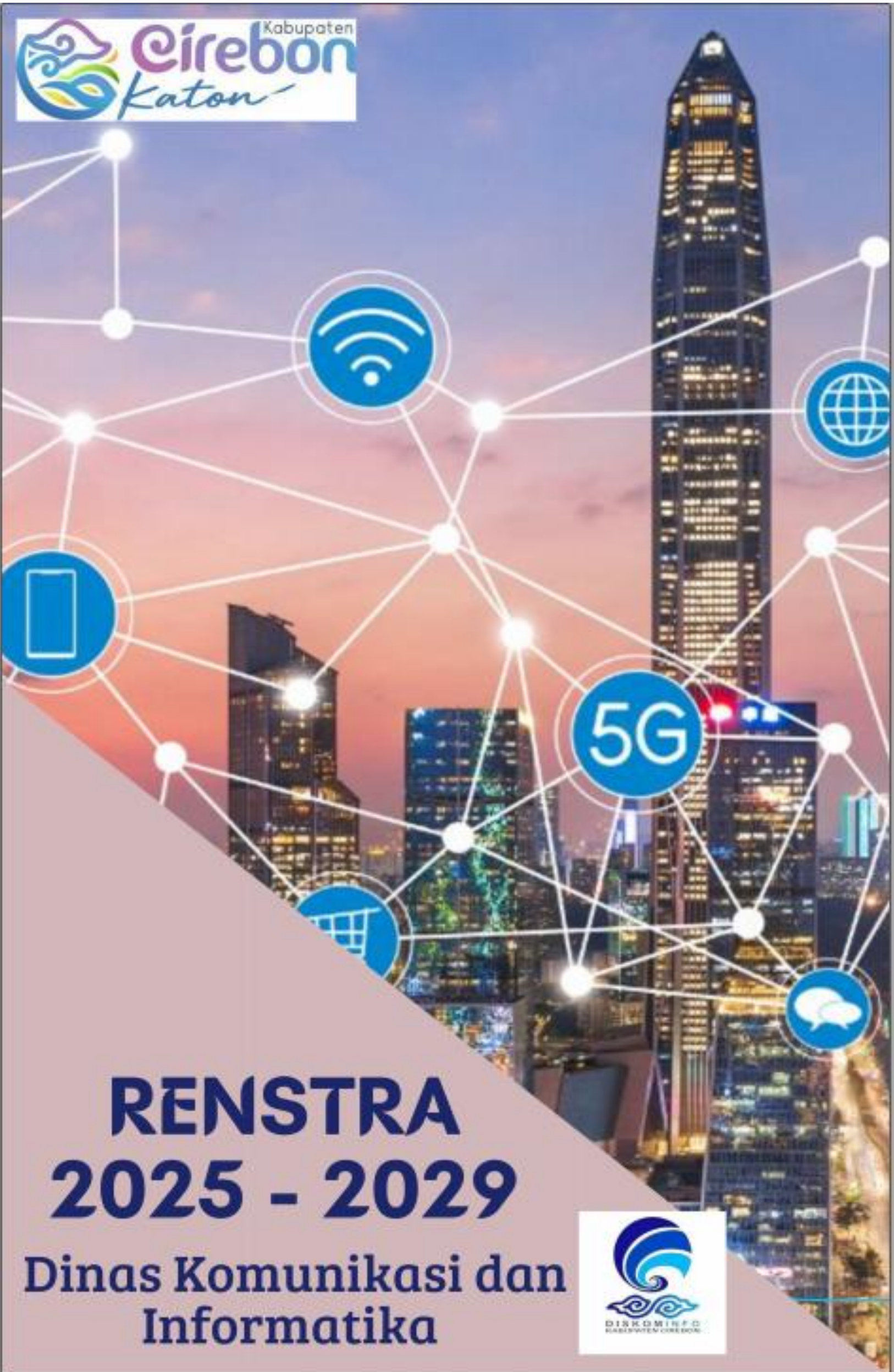




RENSTRA 2025 - 2029

**Dinas Komunikasi dan
Informatika**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain diperlukan untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan agar Perangkat Daerah menyusun Renstra, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun Renstra Tahun 2025 – 2029, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK dan tantangan pembangunan ke

depan, materi Renstra yang telah disusun ini masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Sumber, Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon.



BAMBANG SUDARYANTO, S.H.,M.H
Pembina Tk I
NIP. 19781024 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1 LATAR BELAKANG	1
2 DASAR HUKUM	6
3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS.....	12
1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	12
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
B. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22
2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	22
2.1.1 Komposisi Status Kepegawaian	22
2.1.2 Komposisi Eselon PNS	23
2.1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.....	23
2.1.4 Komposisi Pendidikan PNS.....	24
2.1.5 Komposisi Jenis Kelamin.....	25
2.1.6 Kebutuhan Ideal Pegawai.....	25
2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana	28
C KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	32
3.1 Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika.....	42
3.2 Kinerja Pelayanan Statistik.....	65
3.3 Kinerja Pelayanan Persandian.....	66
D KELOMPOK SASARAN PELAYANAN	66
1. Kelompok sasaran SKPD Dilingkungan Kabupaten Cirerbon	66
2. Badan pusat statistik sebagai pembina kegiatan statistik sektoral.....	66
E TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA.....	66
1. ASTA CITA	67
2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	67
3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	69
4. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.....	70



5. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara.....	72
F TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	73
G PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYA	75
2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	85
A Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	85
B Isu Strategis.....	88
C Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Strategi Analisi SWOT	89
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	93
1 TUJUAN	93
2 SASARAN	95
3 STRATEGI	97
4 ARAH KEBIJAKAN.....	98
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
4 Uraian Program	102
4 Uraian Kegiatan.....	104
4 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah	151
BAB V PENUTUP	153

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian.....	21
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	22
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 2.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	24
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.6	Kondisi Ekiting Sekretariat.....	25
Tabel 2.7	Kondisi Ekiting Biang IKP.....	25
Tabel 2.8	Kondisi Ekiting Biang Teknologi dan Informatika.....	26
Tabel 2.9	Kondisi Ekiting Biang Statistik, Persandian dan E-Government	27
Tabel 2.10	Data Aset Tanah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.....	28
Tabel 2.11	Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.....	29
Tabel 2.12	Daftar Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik.....	30
Tabel 2.13	Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Periode 2020 – 2024.....	32
Tabel 2.14	Data Layanan Publik yang telah Dibangun.....	45
Tabel 2.15	Data Situs Subdomain Kabupaten Cirebon.....	48
Tabel 2.16	Data Sebaran Hotspot Area Publik.....	61
Tabel 2.17	Data provider yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.....	63
Tabel 2.18	Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo Tahun 2025 – 2029.....	67
Tabel 2.19	Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.....	67
Tabel 2.20	Sasaran Strategis dan Program KemenKominfo 2020-2024.....	69
Tabel 2.21	Sandingan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Jabar dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.....	70
Tabel 2.22	Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2029.....	71
Tabel 2.23	Tujuan dan Sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020 -2024.....	73
Tabel 2.24	Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.....	73
Tabel 2.25	Target dan realisasi Anggaran Periode 2020-2024.....	65
Tabel 2.26	Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	74
Tabel 3.1	Domain, Aspek, Indikator.....	79
Tabel 3.2	Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses.....	80
Tabel 3.3	Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Layanan.....	80
Tabel 3.4	Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Renstra	81
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	82
Tabel 3.6	Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	83
Tabel 3.7	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	84
Tabel 3.8	Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah	86
Tabel 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	87
Tabel 4.2	Program Pemda dan Idikator Pemda Tahun 2025 – 2029.....	89
Tabel 4.3	Program dan Indikator Program Diskominfo Kab cirebon Tahun 2025 – 2029.....	89



Tabel 4.4	Teknik merumuskan Program/kegiatan/subkegiatan.....	92
Tabel 4.5	Rencana Program / kegiatan/ Sub Kegiatan/ dan Pendanaan	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025 – 2029.....	121
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025 – 2029.....	122

DAFTAR GAMBARHal

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 1.2	Jadwal / Tahapan RPJMD Tahun 2025.....	4
Gambar 1.3	Alir Skema RPJMD dan Renstra Tahun 2025.....	4
Gambar 2.1	SOTK Diskominfo 143 Tahun 2023.....	12
Gambar 2.2	Sumber daya aoaratur pegawai Diskominfo 2025.....	21
Gambar 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 2025.....	22
Gambar 2.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan.....	23
Gambar 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	24
Gambar 2.6	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Tentang : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN CIRREBON TAHUN
2025 - 2029

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibidang perencanaan diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon periode 2025 - 2029. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah

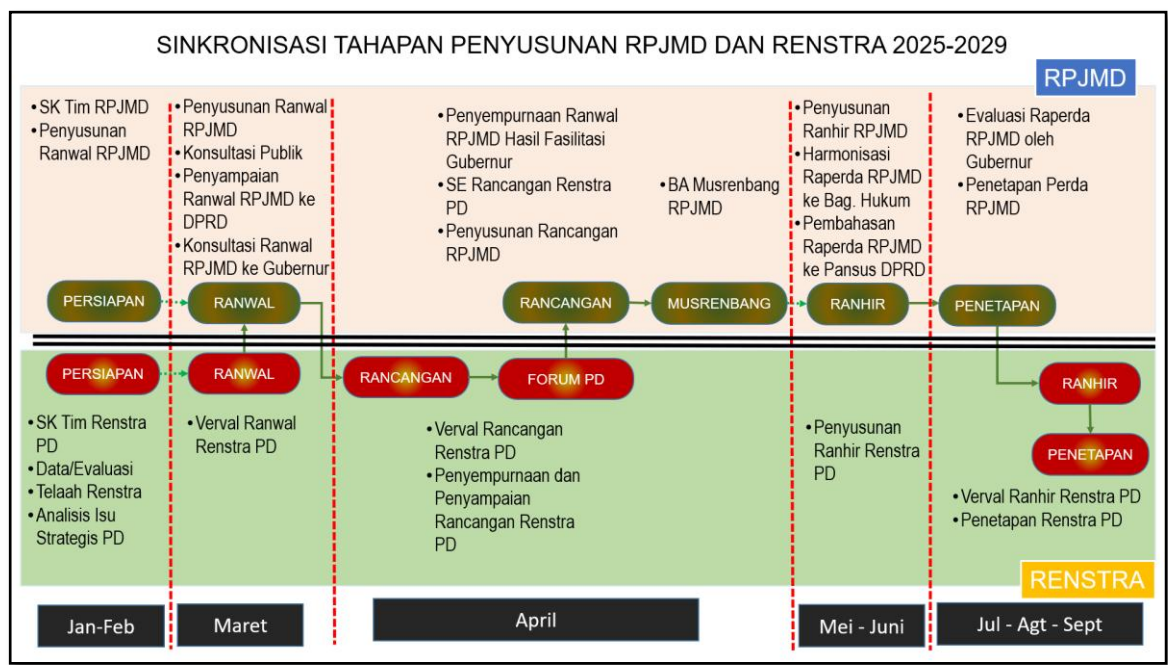
Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : ”Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan

kerja perangkat daerah untuk periode (satu) Tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

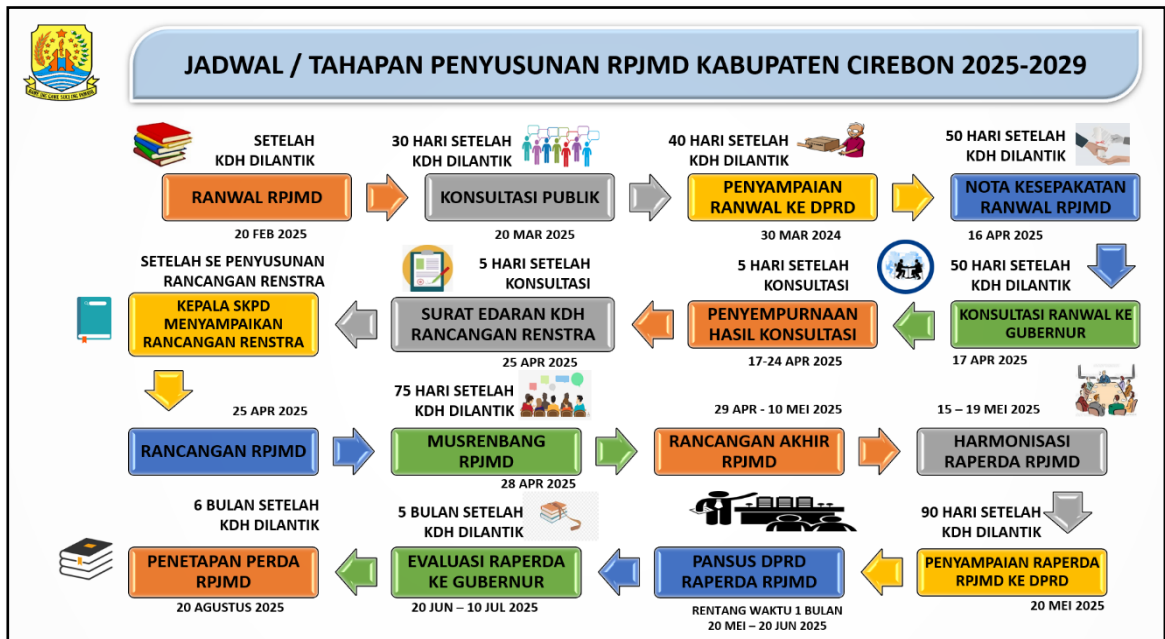
Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

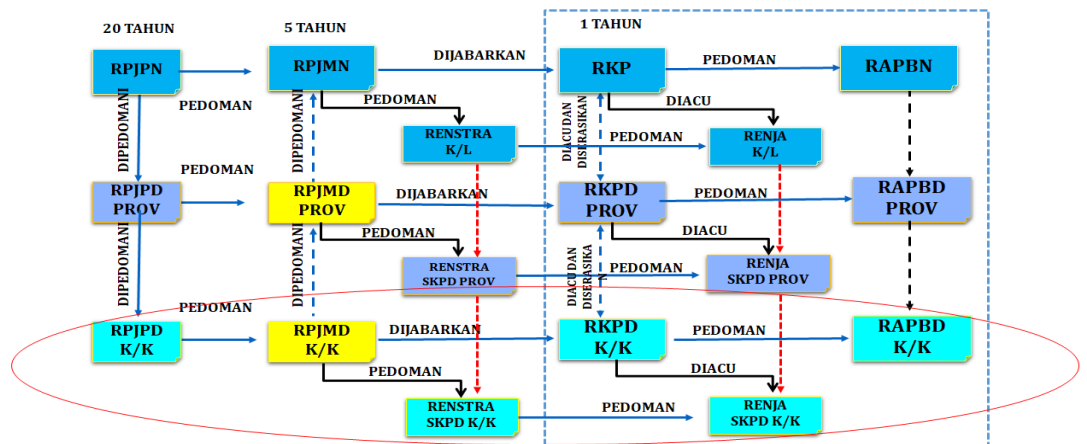
Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2. serta alir Skema dan renstra dalam rencana pembangunan dan pengaagaran pemerintah pusat dan Daerah



Gambar 1.2 Jadwal / Tahapan RPJMD Tahun 2025

SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



Gambar 1.3 Alir Skema RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya

sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan Tahun 2025 ini, maka dilakukan reviu internal dan selanjutnya dilakukan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4), bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 berdasarkan hasil reviu internal yang dilakukan, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon; dan
4. Penyesuaian nomenklatur dan kodifikasi program dan kegiatan serta penambahan subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang disusun setiap Tahun. Selain itu Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun

- 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);

- k. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);
- l. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
- u. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra PD Tahun 2025-2029
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :
 - Untuk memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - Sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025 - 2029 yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan

2. Tujuan ditetapkannya Renstra Tahun 2025 - 2029 adalah :

- Memberikan pedoman bagi Kepala perangkat daerah dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD;
- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika Penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFO

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, beserta menyajikan data – data informasi terkait pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Urusan 5 (lima) Tahun terakhir Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data- data lainnya yang relevan sesuai

dengan kebutuhan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran strategi arah kebijakan renstra Diskominfo Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung Program Prioritas pembangunan Daerah. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat daerah melalui IKU dan Target kinerja penyelenggran Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025 --2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang Efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah:

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan kehumasan dan kemitraan;
4. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
5. Layanan Data Center, *Disaster Recovery Center* dan *Command Center*;
6. Layanan penggunaan domain dan sub domain pemerintah;
7. Layanan keamanan informasi;
8. Layanan data statistik sektoral;

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

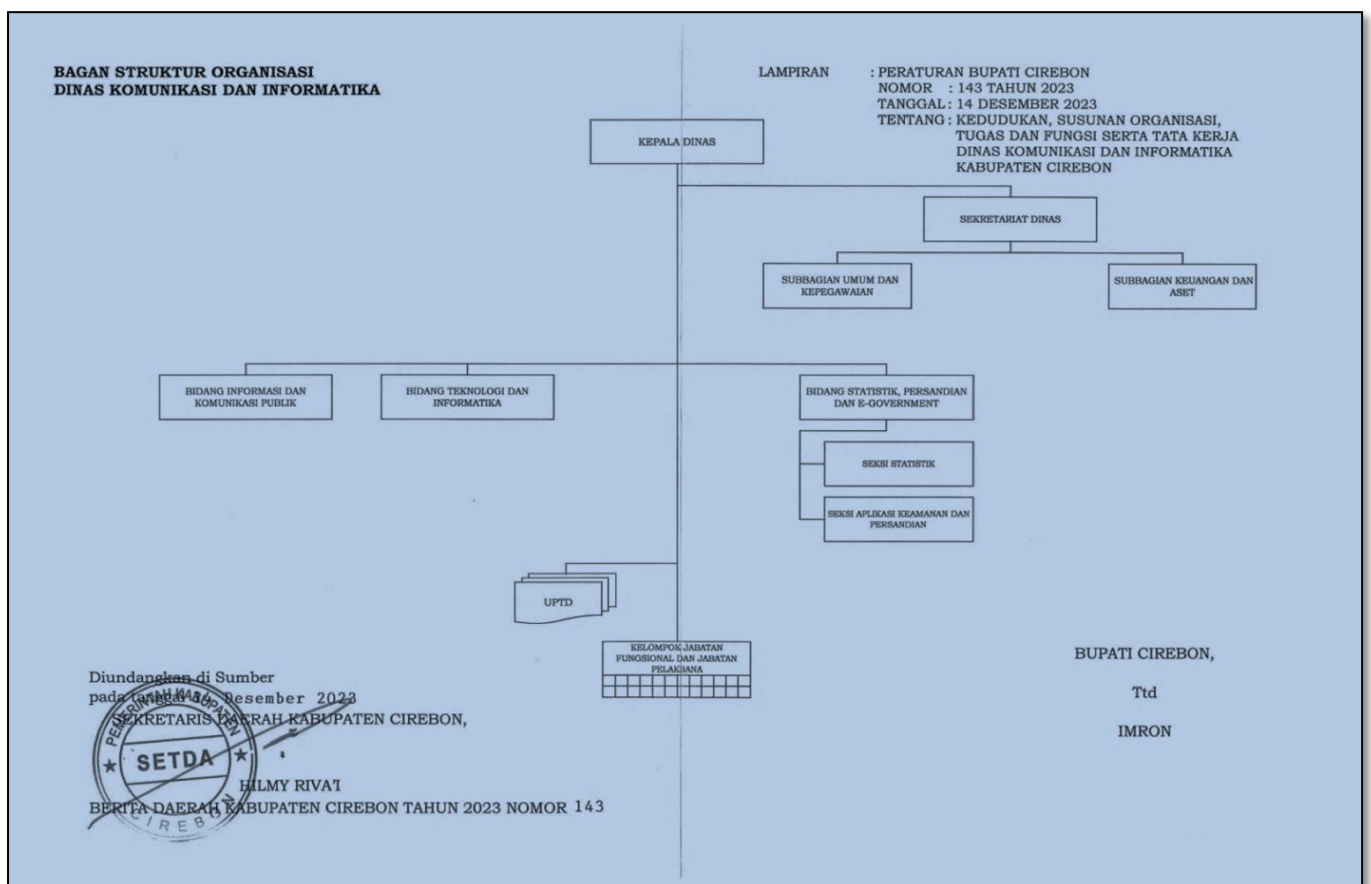
Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- pengelolaan aplikasi informatika;
- pengelolaan statistik sektoral;
- penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pelaksanaan adminstrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 2.1. SOTK Diskominfo



1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengelolaan aplikasi informatika;
 - d. pengelolaan statistik sektoral;
 - e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengoloahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan

dan dokumentasi;

- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
 - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - i. pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:
 - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akutansi; dan
 - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan kemitraan.
- (3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengendalian pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintahan daerah;
 - d. pengendalian pelayanan informasi publik;
 - e. penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - f. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - g. pengelolaan media komunikasi publik;
 - h. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - i. pengendalian manajemen komunikasi krisis;
 - j. penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah;
 - k. pelaksanaan layanan hubungan media;
 - l. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - m. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi dan Informatika

- (1) Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informatika.
- (3) Bidang Teknologi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Teknologi dan Informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Teknologi dan Informatika;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - d. peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
 - e. pelaksanaan *government cloud computing*;
 - f. pengelolaan akses internet pemerintahan dan publik;
 - g. pelaksanaan *filtering* konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
 - h. pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintahan daerah;
 - i. pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi;
 - j. pelaksanaan pengelolaan walidata;
 - k. pelayanan *recovery* data dan informasi;
 - l. pengelolaan data elektronik pemerintahan;
 - m. pelaksanaan penerapan interoperabilitas;
 - n. pelaksanaan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - o. pengembangan pusat *Application Programming Interface (API)* daerah;
 - p. pelaksanaan monitoring *traffic* elektronik;
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Teknologi dan Informatika; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik, Persandian, dan *E-Government*

- (1) Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan *E-Government* yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Statistik, Persandian, dan *E-Government* mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelola statistik, persandian dan *e-government*.
- (3) Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang statistik, persandian dan *e-government*;
 - c. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan layanan teknologi informasi;
 - e. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - g. pelayanan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintahan daerah;
 - j. penyelenggaraan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Statistik

(1) Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi Statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*.

(2) Seksi Statistik, melaksanakan tugas:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Statistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- d. peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- e. pembangunan metadata statistik sektoral;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. pengembangan infrastruktur data statistik;
- h. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian

(1) Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*.

(2) Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian, melaksanakan tugas:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi keamanan dan persandian;
- c. pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- d. pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;

- e. pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
- f. pelaksanaan penetapan dan pengelolaan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta pelayanan penetapan tata kelola nama domain, sub domain pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
- h. pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan audit aplikasi keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah;
- j. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- k. pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- l. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
- m. penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- p. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- q. pelaksanaan penting/vital/krisis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- r. pelaksanaan pengelolaan *Security Operation Center (SOC)*
- s. pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- t. penyusunan instrument dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,

- operasional pengamanan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- u. perencanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - v. pelaksanaan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi
 - w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (4) Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- (5) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Klerek, operator dan teknis.
- (6) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

B. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber, telepon (0231) 8330580 kode pos 45611.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 55 (lima puluh Lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

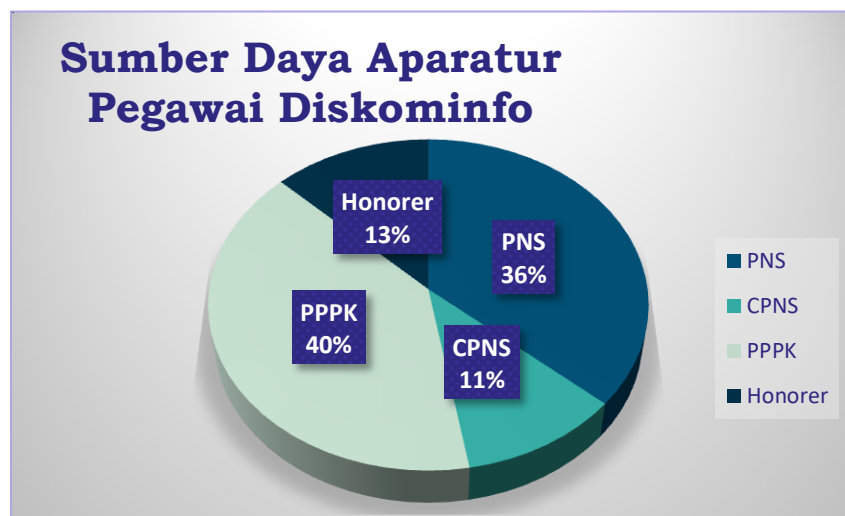
2.1.1 Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	20	36%
2	CPNS	6	11%
3	PPPK	22	40%
4	Honorer	7	13%
	Jumlah	55	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2025

Gambar 2.2 : Sumber daya aoaratur pegawai Diskominfo 2025



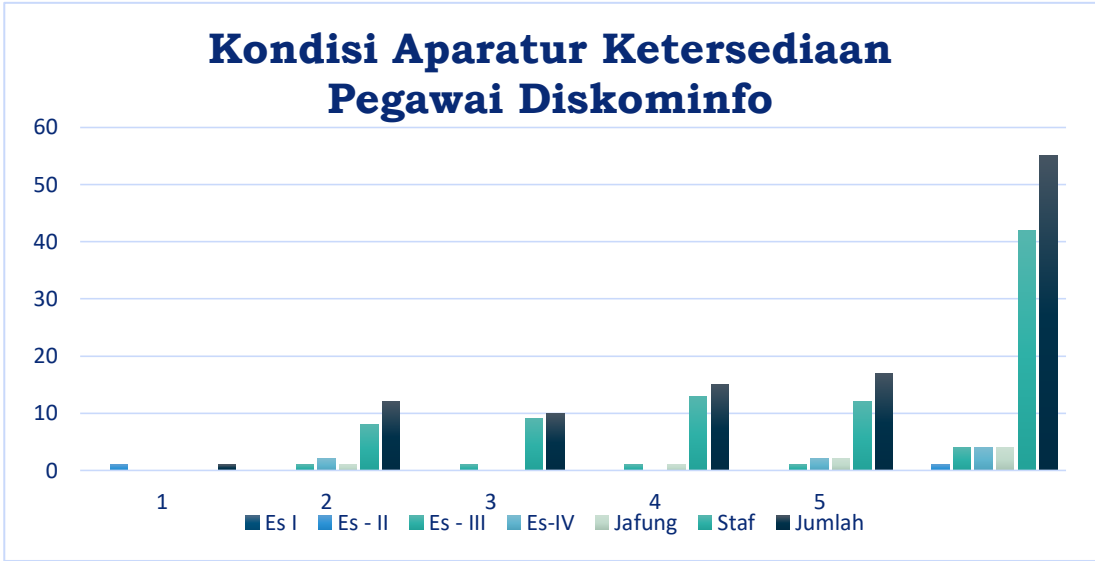
2.1.2 Komposisi Eselon PNS

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2025

No	Uraian	Es I	Es - II	Es - III	Es-IV	Jafung	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	2	1	8	12
3	Bidang dan Teknologi Informatika			1	0	0	9	10
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			1	0	1	13	15
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government			1	2	2	12	17
	Jumlah		1	4	4	4	42	55

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2025

Gambar 2.3 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 2025



2.1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

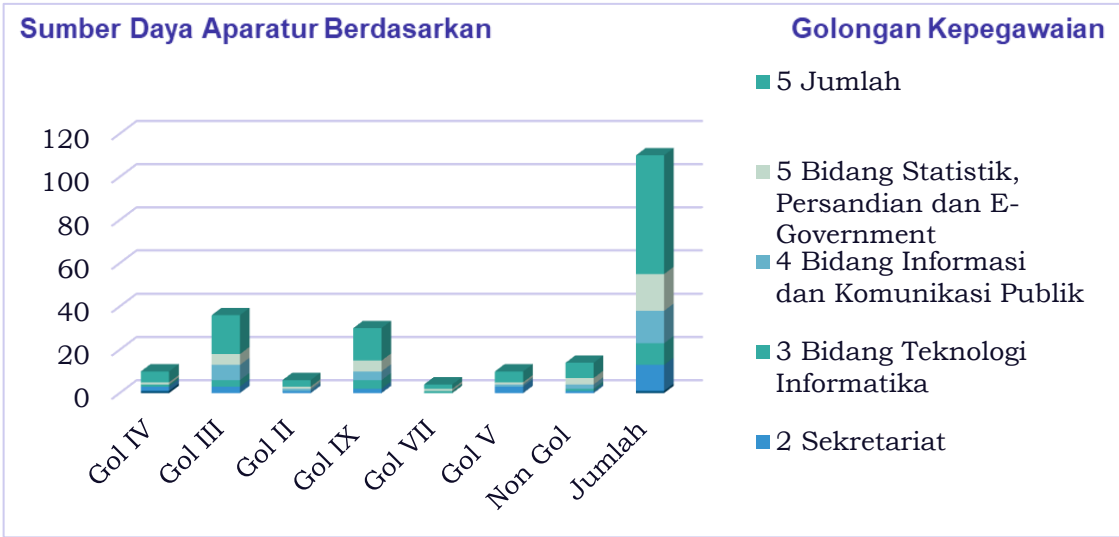
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol IX	Gol VII	Gol V	Non Gol	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		0					1
2	Sekretariat	2	3	1	2		3	1	12
3	Bidang Teknologi Informatika	1	3		4	1		1	10
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		7	1	4		1	2	15
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	1	5	1	5	1	1	3	17
	Jumlah	5	18	3	15	2	5	7	55

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2025

Tabel Gambar 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2025



2.1.4 Komposisi Pendidikan PNS

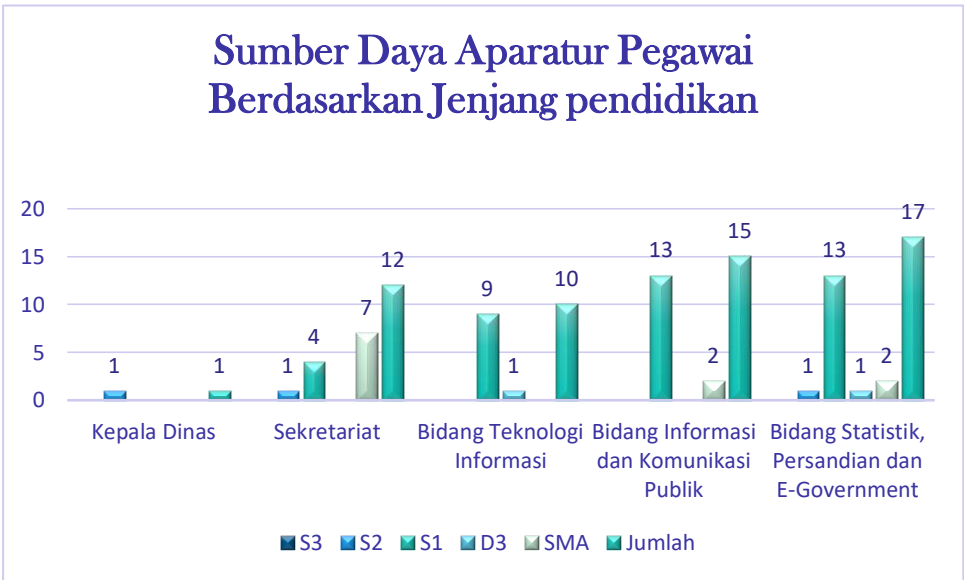
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat		1	4		7	12
3	Bidang Teknologi dan Informatika			9	1		10
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			13		2	15
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government		1	13	1	2	17
	Jumlah	0	3	39	2	11	55

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2025

Tabel Gambar 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



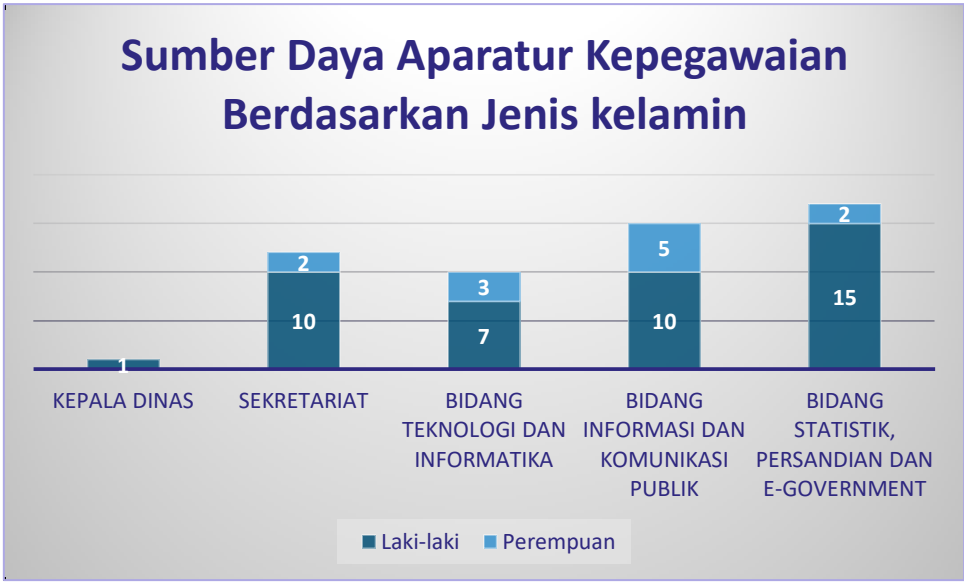
2.1.5 Komposisi Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	10	2
3	Bidang Teknologi dan Informatika	7	3
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	10	5
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	15	2
Jumlah		43	12

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2025

Tabel Gambar 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



2.1.6 Kebutuhan Ideal Pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdiri atas sekretariat dan 3 bidang yaitu bidang informasi dan komunikasi publik, bidang teknologi dan informatika, bidang statistik, persandian dan e-government. Interpretasi dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Sekretariat

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Sekretariat sebanyak 12 pegawai, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada sekretariat sebanyak 30 pegawai ASN.

Tabel Gambar 2.6 Kondisi Ekiting Sekretariat Tahun 2025

No	Sekretariat	Exiting	Ideal
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
2	Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
3	JF Perencana Ahli Muda	1	1
	JF Perencana Ahli Madya	0	1
4	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1
5	Penata Layanan Operasional	2	3
6	Pengelola layanan Operasional	0	1
7	Perencana Ahli Pertama	0	2
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1
9	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1
10	Penata Layanan Operasional	0	1
11	Pengelola layanan Operasional	0	4
12	Pengadministrasi Perkantoran	1	2
13	Operator Layanan Operasional	1	3
14	Subbagian Keuangan dan Aset	1	1
15	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	1	1
16	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
17	Pengolah Data dan Informasi	0	1
18	Pengelola layanan Operasional	0	1
19	Pengadministrasi Perkantoran	1	1
Jumlah		12	30

➤ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 13 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 44 pegawai ASN.

Tabel Gambar 2.7 Kondisi Ekiting Biang IKP Tahun 2025

No	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Exiting	Ideal
1	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1	1
2	Pranata Humas Ahli Madya	0	3
3	Pranata Humas Ahli Muda	1	5
4	Pranata Humas Ahli Pertama	5	8
5	Pranata Humas Mahir / Pelaksana	0	7
6	Penata Layanan Operasional	3	6
7	Pengelola Layanan Operasional	1	8
8	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1
9	Pengadministrasian Perkantoran	1	3
10	Pengolah data dan Informasi	0	1
11	Operator Layanan Operasional	0	1
	Jumlah	13	44

➤ Bidang Teknologi dan Informatika

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Teknologi Informatika sebanyak 9 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Teknologi Informatika sebanyak 33 pegawai ASN.

Tabel Gambar 2.8 Kondisi Ekiting Bidang Teknologi dan Informatika Tahun 2025

No	Bidang Teknologi dan Informatika	Exiting	Ideal
1	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	1	1
2	JF Pranata Komputer Ahli Madya	0	1
3	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	3
4	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	4	6
5	JF Pranata Komputer Penyelia	0	2
6	JF Pranata Komputer Mahir/ Pelaksana	0	4
7	JF Pranata Komputer Terampil/ Pelaksana Pemula	1	5
8	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
9	Penata Layanan Operasional	2	4
10	Pengolah Data dan Informasi	0	2
11	Pengelola layanan Operasional	0	2
12	Operator Layanan Operasional	0	1
	Jumlah	9	33

➤ Bidang Statistik, Persandian dan E-Government

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 15 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 59 pegawai ASN.

Tabel Gambar 2.9

Kondisi Ekiting Biang Statistik, Persandian dan E-Government Tahun 2025

No	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	Exiting	Ideal
1	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	1	1
2	JF Pranata Komputer Ahli Madya	1	2
3	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	5
4	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	11
5	JF Pranata Komputer Penyelia	0	4
6	JF Pranata Komputer Mahir/ Pelaksana	0	6
7	JF Pranata Komputer Terampil/ Pelaksana Pemula	1	10

8	Seksi Statistik	0	
9	Kepala Seksi Statistik	1	1
10	JF Statistisi Ahli Madya	0	1
11	JF Statistisi Ahli Muda	0	2
12	JF Statistisi Ahli Pertama	1	2
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1
14	Penata Layanan Operasional	2	3
15	Pengelola layanan Operasional	0	3
16	Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian	0	0
17	Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian	1	1
18	JF Sandiman Ahli Pertama	1	1
19	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1
20	Penata Layanan Operasional	0	1
21	Pengelola layanan Operasional	1	2
22	Operator Layanan Operasional	1	1
	Jumlah	15	59

2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.10 Data Aset Tanah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode Barang	Nama Bidang Barang	BMD	Keterangan
	GOLONGAN TANAH		
1.3.1.01.01.04.001	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja.	2	
1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal.	1	

Tabel 2.11
Daftar Sarana Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode Barang	Nama Bidang Barang	BMD	Keterangan
	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN		
1.3.2.05.02.05.002	Alat Dapur.	2	
1.3.2.05.02.05.009	Alat Dapur.	2	
1.3.2.05.01.05.027	Alat Kantor Lainnya.	7	
1.3.2.05.01.05.010	Alat Kantor Lainnya.	1	
1.3.2.05.01.05.002	Alat Kantor Lainnya.	51	
1.3.2.05.01.05.008	Alat Kantor Lainnya.	1	
1.3.2.05.01.05.043	Alat Kantor Lainnya.	2	
1.3.2.05.01.05.012	Alat Kantor Lainnya.	-	
1.3.2.06.02.08.043	Alat Komunikasi Khusus.	3	
1.3.2.06.02.06.002	Alat Komunikasi Sosial.	2	
1.3.2.06.02.01.010	Alat Komunikasi Telephone.	1	
1.3.2.06.02.01.003	Alat Komunikasi Telephone.	1	
1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam Kebakaran.	19	
1.3.2.05.02.03.001	Alat Pembersih.	1	
1.3.2.05.02.04.004	Alat Pendingin.	46	
1.3.2.05.02.04.007	Alat Pendingin.	14	
1.3.2.05.02.04.001	Alat Pendingin.	1	
1.3.2.05.01.04.007	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	1	
1.3.2.05.01.04.005	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	8	
1.3.2.05.01.04.001	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	27	
1.3.2.05.01.04.027	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	2	
1.3.2.05.01.04.002	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	7	
1.3.2.05.01.04.026	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	3	
1.3.2.05.01.04.003	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	16	
1.3.2.05.01.04.004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.	1	
1.3.2.05.02.06.021	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	1	
1.3.2.05.02.06.038	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	2	
1.3.2.05.02.06.048	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	1	
1.3.2.05.02.06.028	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	4	
1.3.2.05.02.06.007	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	3	
1.3.2.05.02.06.014	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	9	
1.3.2.05.02.06.039	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	1	
1.3.2.05.02.06.001	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	1	
1.3.2.05.02.06.008	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	7	
1.3.2.05.02.06.036	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	2	
1.3.2.05.02.06.002	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	28	
1.3.2.05.02.06.018	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	7	
1.3.2.05.02.06.058	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	41	
1.3.2.05.02.06.012	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	6	

Kode Barang	Nama Bidang Barang	BMD	Keterangan
1.3.2.01.03.04.002	Electric Generating Set.	1	
1.3.2.01.03.04.003	Electric Generating Set.	1	
1.3.2.01.03.04.001	Electric Generating Set.	2	
1.3.2.02.01.04.001	Kendaraan Bermotor Beroda Dua.	-	
1.3.2.02.01.02.003	Kendaraan Bermotor Penumpang.	1	
1.3.2.05.03.03.008	Kursi Kerja Pejabat.	1	
1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat.	1	
1.3.2.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat.	4	
1.3.2.05.03.07.004	Lemari Dan Arsip Pejabat.	2	
1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pejabat.	16	
1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat.	2	
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat.	1	
1.3.2.05.02.01.036	Meubelair.	47	
1.3.2.05.02.01.032	Meubelair.	71	
1.3.2.05.02.01.030	Meubelair.	148	
1.3.2.05.02.01.031	Meubelair.	5	
1.3.2.05.02.01.024	Meubelair.	30	
1.3.2.05.02.01.002	Meubelair.	4	
1.3.2.05.02.01.039	Meubelair.	26	
1.3.2.05.02.01.008	Meubelair.	27	
1.3.2.05.02.01.014	Meubelair.	3	
1.3.2.05.02.01.005	Meubelair.	1	
1.3.2.05.02.01.048	Meubelair.	5	
1.3.2.10.02.04.020	Peralatan Jaringan.	6	
1.3.2.10.02.04.015	Peralatan Jaringan.	1	
1.3.2.10.02.04.003	Peralatan Jaringan.	4	
1.3.2.10.02.04.021	Peralatan Jaringan.	1	
1.3.2.10.02.04.014	Peralatan Jaringan.	7	
1.3.2.10.02.04.002	Peralatan Jaringan.	13	
1.3.2.10.02.04.001	Peralatan Jaringan.	31	
1.3.2.10.02.04.023	Peralatan Jaringan.	4	
1.3.2.10.02.01.012	Peralatan Mainframe.	1	
1.3.2.10.02.02.001	Peralatan Mini Komputer.	31	
1.3.2.10.02.02.009	Peralatan Mini Komputer.	1	
1.3.2.10.02.03.015	Peralatan Personal Komputer.	1	
1.3.2.10.02.03.017	Peralatan Personal Komputer.	6	
1.3.2.10.02.03.002	Peralatan Personal Komputer.	2	
1.3.2.10.02.03.003	Peralatan Personal Komputer.	29	
1.3.2.10.02.03.004	Peralatan Personal Komputer.	12	
1.3.2.06.01.01.002	Peralatan Studio Audio.	2	
1.3.2.06.01.01.025	Peralatan Studio Audio.	1	
1.3.2.06.01.01.090	Peralatan Studio Audio.	1	
1.3.2.06.01.01.036	Peralatan Studio Audio.	40	
1.3.2.06.01.01.056	Peralatan Studio Audio.	10	

Kode Barang	Nama Bidang Barang	BMD	Keterangan
1.3.2.06.01.05.038	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah.	3	
1.3.2.06.01.05.047	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah.	1	
1.3.2.06.01.02.126	Peralatan Studio Video Dan Film.	10	
1.3.2.06.01.02.060	Peralatan Studio Video Dan Film.	2	
1.3.2.06.01.02.105	Peralatan Studio Video Dan Film.	3	
1.3.2.06.01.02.061	Peralatan Studio Video Dan Film.	4	
1.3.2.06.01.02.038	Peralatan Studio Video Dan Film.	1	
1.3.2.06.01.02.045	Peralatan Studio Video Dan Film.	7	
1.3.2.06.01.02.015	Peralatan Studio Video Dan Film.	1	
1.3.2.06.01.02.012	Peralatan Studio Video Dan Film.	1	
1.3.2.06.01.02.163	Peralatan Studio Video Dan Film.	1	
1.3.2.10.01.02.002	Personal Komputer.	14	
1.3.2.10.01.02.003	Personal Komputer.	4	
1.3.2.10.01.02.001	Personal Komputer.	73	
1.3.2.10.01.02.009	Personal Komputer.	1	
1.3.2.06.03.20.001	Switcher/Menara Antena .	6	
	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor.	5	
1.3.3.01.01.13.001	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga.	1	
1.3.3.03.01.03.002	Bangunan Menara Telekomunikasi.	3	
1.3.3.03.01.03.005	Bangunan Menara Telekomunikasi.	16	
1.3.3.01.01.33.002	Bangunan Parkir.	1	
1.3.3.04.01.04.001	Pagar.	3	
1.3.3.01.01.36.001	Taman.	1	
	GOLONGAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI		
1.3.4.03.01.05.004	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya.	1	
1.3.4.03.07.01.004	Instalasi Pertahanan Di Darat.	44	
1.3.4.04.02.01.002	Jaringan Transmisi.	2	
1.3.4.04.02.01.003	Jaringan Transmisi.	1	
1.3.4.04.02.02.003	Jaringan Distribusi.	6	
1.3.4.04.03.01.001	Jaringan Telepon Diatas Tanah.	1	
1.3.4.04.03.02.002	Jaringan Telepon Dibawah Tanah.	1	
	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA		
1.3.5.01.01.01.003	Buku Umum.	10	
1.3.5.01.02.01.002	Audio Visual.	2	
	GOLONGAN ASET LAINNYA		
1.5.3.01.01.05.001	Software.	27	
1.5.3.01.01.06.001	Kajian.	9	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, 2025

Tabel 2.12
Daftar Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Uraian
1	Papan pengumuman
2	Running Text
3	Website Dinas (diskominfo.cirebonkab.go.id)
4	Website Kabupaten (cirebonkab.go.id)
5	Lembar leaflet
6	Bookleat
7	Eksempler majalah (Paseban)
8	Desk layanan informasi publik
9	Mobil diseminasi informasi (wawar)
10	Ruang internet publik
11	Layanan Call centre 112

C. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana.

Tabel 2.13
Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Periode 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKK (Permendagri 13 Tahun 2019)															
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1																
outcome	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	73	73	73	73	71	73	73	73	73	71	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	73	73	73	73	71	73	73	73	73	71	100%	100%	100%	100%	100%
output	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73	73	73	73	n/a	73	73	73	73	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang	73	73	73	73	n/a	73	73	73	73	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo															
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
2																
outcome	Presentase layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	48	48	48	48	19	48	48	48	48	17	100%	100%	100%	100%	89%
output	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	48	48	48	48	n/a	48	48	48	48	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase perangkat daerah yang memiliki	96	102	185	256	-	96	102	185	256	-	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	portal dan situs web yang sesuai standar															
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	19	19	19	19	n/a	19	19	17	n/a	n/a	100%	100%	89%	n/a	n/a
	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	19	19	19	19	n/a	19	19	17	14	n/a	100%	100%	89%	74%	n/a
	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	19	19	19	19	n/a	19	19	17	10	n/a	100%	100%	89%	53%	n/a
	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	96	190	220	235	n/a	96	190	220	235	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang	19	19	19	19	n/a	19	19	19	19	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah															
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	73	73	73	71	n/a	73	73	73	71	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	73	73	73	71	n/a	73	73	73	71	–	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	73	73	73	71	n/a	73	73	73	71	–	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase data yang dapat berbagi pakai	73	0	0	0	n/a	73	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	n/a
	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	73	73	73	73	n/a	73	73	73	73	0	100%	100%	100%	100%	n/a
	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	1%	2%	2%	2%	n/a	1%	2%	2%	2%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	3															
outcome	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2105410	2189785	2365048	2039886	n/a	1754141	1998471	1750337	2039386	n/a	83%	91%	74%	100%	
output	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	71	53	5	16	n/a	71	53	5	16	n/a	100%	100%	100%	100%	
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	360	17	720	720	n/a	360	17	720	720	n/a	100%	100%	100%	100%	
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	n/a	1	1	1	n/a	n/a	1	1	1	n/a	0%	100%	100%	100%	0%
URUSAN STATISTIK																

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73	73	73	73	n/a	73	73	73	73	n/a	100%	100%	100%	100%	
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	73	73	73	73	n/a	73	73	73	73	n/a	100%	100%	100%	100%	
Output	Tersedianya buku profil daerah	1	1	1	1	n/a	1	1	1	1	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	1	n/a	1	1	1	1	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	1	n/a	1	1	1	1	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Buku “Kabupaten Cirebon dalam angka”	1%	1%	1%	1%	n/a	1%	1%	1%	1%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Buku “PDRB”	1%	1%	1%	1%	n/a	1%	1%	1%	1%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	n/a	23	112	67	-	n/a	23	35	67	-	n/a	100%	31%	100%	-

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase kelengkapan metadata indikator sectoral	n/a	28	112	67	-	n/a	28	50	67	-	n/a	100%	45%	100%	-
URUSAN PERSANDIAN							n/a									
Outcome	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	5	5	2	2	n/a	5	5	2	2	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a
Output	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	diaudit dengan resiko kategori rendah															
	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO																
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	2,57	2,67	2,77	2,87	3,63	2,57	1,91	3,7	2,87	3,63	100%	72%	134%	100%	100%
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	56,63	40	45	50	57	31,87	73,88	81,7	90,92	90	56%	185%	182%	182%	158%
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam	40	52,5	65	77,5	90	58,05	57,5	76,35	77,5	90	145%	110%	117%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah															
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
	eningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	10	–	–	–	–	0,58	–	–	–	–	6%	-	-	-	-
	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	3,55	3,57	3,59	3,61	3,63	3,56	3,57	3,59	3,61	3,63	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2020 - 2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua indikator kinerja telah mencapai target. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut :

1. Pada dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengampu SPM :
2. Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2019, IKK Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup 3 urusan, yaitu:
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika (5 indikator)
 - b) Urusan Statistik (3 indikator)
 - c) Urusan Persandian (1 indikator)

Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mempunyai data, sementara pada urusan statistik semua indikator telah memenuhi target. Pada urusan persandian belum mempunyai data pendukung.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang semuanya telah mencapai target yang ditentukan.

3.1. Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian. Berikut gambaran pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

1. Media Massa

Pelayanan dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (TV dan Radio).

a. TV dan Radio

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan diseminasi informasi melalui TV dan radio lokal dengan mengundang narasumber dari SKPD di Kabupaten Cirebon.

b. Surat Kabar

Pelayanan informasi melalui surat kabar lokal dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon.

2. Media Baru (*online*)

Di era digitalisasi ini, setiap daerah harus memiliki website pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Cirebon maupun kegiatan pembangunan. Alamat website Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah <http://www.cirebonkab.go.id/> dan alamat website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah <http://www.diskominfo.cirebonkab.go.id/>.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Cirebon memanfaatkan media sosial dalam upaya memperluas akses informasi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki beberapa akun media sosial yaitu

a. FB

Fans Page Facebook resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat dikunjungi pada <https://www.facebook.com/diskominfokabcirebon>.

b. Instagram

Akun instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan alamat <https://www.instagram.com/diskominfokabcirebon>.

c. Twitter

Akun twitter resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah [@cirebonkab](https://twitter.com/cirebonkab). Akun ini telah terverifikasi (*verified*).

d. Cirebonkabsaberhoaks

Akun [cirebonkabsaberhoaks](#) adalah media untuk menampung aspirasi tentang kabar-kabar yang bukan akun dari Cirebon atau diskominfo

3. Media Interpersonal

Pelayanan informasi ke aparaturnya, masyarakat atau pelajar melalui media interpersonal adalah berupa kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta kegiatan pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Media Tradisional

Di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa kelompok media tradisional yang diwadahi FK METRA yang dilibatkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

5. Media Luar Ruang

Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang adalah berupa booklet, leaflet, banner dan spanduk. Media luar ruang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa informasi kegiatan pemerintah daerah, ucapan selamat maupun himbauan kepada masyarakat.

6. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

KIM merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial dengan memberdayakan Radio Komunitas yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

7. Penerapan Tata Kelola TIK

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city sudah berjalan dengan baik dimana didalamnya telah ada upaya dan pilot project integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Saat ini tercatat sebanyak 48 aplikasi dan Website dipergunakan di lingkungan instansi pemerintahan dimana jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah tersedia di seluruh Kabupaten Cirebon, baik berbasis kabel FO maupun yang bersifat wireless. Dari segi jangkauan (*coverage*) internet di Kabupaten Cirebon seluruh dinas sudah terhubung dengan jaringan FO sedangkan untuk kecamatan

sebanyak 40 dan 12 kelurahan menggunakan wireless. Namun untuk Pemerintah Desa saat ini baru 9 desa yang difasilitasi wireless sedangkan 403 desa lainnya menggunakan internet mandiri yang diselenggarakan Telkom. Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menambah jumlah bandwidh sehingga seluruh desa dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Saati ini kapasitas bandwidth sebesar 800 Mbps. Selain itu Data Center telah dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan kapasitas 24 server meskipun masih belum memenuhi standar kelayakan data center dan belum mampu menjadi data recovery center namun target minimal Tier 1 pada Tahun 2025. Terkait pemberian akses internet kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakna 26 titik hotspot publik. Walaupun deminikan, kebutuhan tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang setiap Tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi komunikasi/informatika. Pengamanan data yang dilakukan dengan memberlakukan password untuk akses data dan menggunakan firewall barracuda untuk server di data center. Operator data center melakukan backup data dan aplikasi secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Untuk aplikasdi internal atau sudomain, juga penggunaan subnet berbeda dengan akses publik dengan akses jaringan internal. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dan TIK, Kabupaten Cirebon masih perlu membangun rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan secara komprehensif. Beberapa aplikasi yang fokus untuk kepentingan pemerintahan sudah dikembangkan oleh Badan/Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Data Layanan Publik yang telah Dibangun Tahun 2025

NO	LAYANAN PUBLIK	SISTEM INFORMASI	APLIKASI INFORMASI	KETERANGAN
1	Publik -Jaminan Sosial	SIM SLRT	Aplikasi pendaftaran Surat Rujukan Tidak Mampu	Dinas Sosial
2		SIM PMKS	Sistem Informasi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
3	Publik - Kependudukan	SIM eKTP	Aplikasi pendaftaran ktp elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4		SIM Akta Online	Aplikasi pendaftaran akta online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5		SIM Sintren	Aplikasi pendaftaran kartu keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Publik - Kesehatan	SIM Rujukan	Aplikasi rujukan kegawatdaruratan kesehatan	Dinas Kesehatan
7		SIM rujukan kab. cirebon	Sistem informasi untuk kegawat darurat kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Publik - Komunikasi dan Informatika	SIM PPID	Sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
9		SIM informasi Pemkab	Sistem Informasi Manajemen berbentuk video kegiatan Pemkab	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Publik - Pekerjaan dan Bisnis	SIM Produk Unggulan Desa	Sistem informasi menampilkan produk-produk unggulan desa	Bappelitbangda
11		SIM Harga Produk Pangan	Sistem untuk menginformasikan harga produk pangan	Dinas Ketahanan Pangan
12		SIM Izin Online	Aplikasi perizinan online Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13		SIM Tera	Aplikasi pendaftaran tera ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14		SIM Retribusi Pasar	Sistem informasi Pendataan Pendapatan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15		SIM Industri	Sim Informasi untuk data perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16		SIM Industri	Sim Informasi untuk data perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	LAYANAN PUBLIK	SISTEM INFORMASI	APLIKASI INFORMASI	KETERANGAN
17		SIM Metrologi Legal	Sim informasi untuk pendaftaran tera ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18		Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
19		Sistem Informasi Tenaga Kerja	Sistem pencarian kerja di Kab. Cirebon	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20		SIM Permohonan Rekom PMI	Sistem Informasi pekerja migran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21		SIM Paten	Aplikasi perizinan di kecamatan	Kecamatan Suranenggala
22		SIM OpenSID	Aplikasi informasi dan pelayanan perizinan desa	Pemerintah Desa
23	Publik - Pendidikan	Sistem Informasi Dapodik	Website ini memberikan informasi Data Pokok Pendidikan di Provinsi meliputi Data Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Data Pokok Peserta Didik (NISN), dan Data Pokok . Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK)	Dinas Pendidikan
24		SIM Laporan individu sekolah	Sistem informasi menampilkan individu siswa	Dinas Pendidikan
25	Publik - Pengajaran	SIM Perpustakaan	Aplikasi perpustakaan digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Publik – Keuangan	SIM RPAS	Aplikasi retribusi pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Publik -Lainnya	SIM Dashboard Kepegawaian	Dashboard Kepegawaian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
28		SIM Dinas	Website Dinas	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
29		SIM Informasi Keormasan	Sistem Informasi Manajemen untuk data ormas	Badan Kesbangpol
30		Sistem Informasi Dinas Keuangan dan Aset	Website Dinas	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31		SIM Dashboard Keuangan	Dashboard Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	LAYANAN PUBLIK	SISTEM INFORMASI	APLIKASI INFORMASI	KETERANGAN
32		SIM Pemkab	Sistem website Pemkab	Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
33		SIM Dinas	Website Dinas	BPBD
34		Sistem Informasi Dinas Arsip Pus	Website Dinas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
35		SIM Dinas Parbudpora	Website Dinas	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
36		SIM Dinas Kesehatan	Website Dinas	Dinas Kesehatan
37		Sistem Informasi Komuditas Pangan	Sistem Informasi average harga bahan pokok	Dinas Ketahanan Pangan
38		SIM Pemkab	Website Informasi Pemerintah Kab. Cirebon	Dinas Komunikasi dan Informatika
39		SIM Direktori	Website Keberadaan Lokasi Usaha	Dinas Komunikasi dan Informatika
40		SIM Dinas Kominfo	Website Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
41		SIM Informasi Koperasi	Sim informasi untuk data Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
42		SIM Dinas	Website Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
43		SIM Dinas	Website Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
44		SIM Dinas PMPTSP	Website Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
45		SIM Dinas Pendidikan	Website Dinas	Dinas Pendidikan
46		SIM Dinas	Website informasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
47		SIM Inspektorat	Website Dinas	Inspektorat
48		SIM PKK	Website Organisasi PKK	PKK Kab. Cirebon

Sumber : LPPD Tahun 2025

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibuat merupakan sebagai salah satu penunjang *smart city* dan rencananya aplikasi tersebut akan dikembangkan lagi fiturnya serta dibuat aplikasi baru baik untuk pemerintahan dan pelayanan publik sehingga capaian *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik.

8. Situs Subdomain Kabupaten Cirebon

Berikut situs yang terintegrasi subdomain Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Data Situs Subdomain Kabupaten Cirebon Tahun 2025

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
1	cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Diskominfo	Aktif
2	absensi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
3	absensi.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	BKAD	Aktif
4	absensi.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
5	absensi.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	Dpmpstsp	Aktif
6	absensi.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi	DPRD	Aktif
7	absensi.setda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	Setda	Aktif
8	adik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
9	admin.suranenggalakec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,139			Non Aktif
10	adminbang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,194	Aplikasi		Aktif
11	agenda.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
12	ambulu.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
13	analytics.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
14	anggaran.cirebonkab.go.id.	103,212,211,200			Non Aktif
15	anjab.cirebonkab.go.id.	103,212,211,216			Non Aktif
16	antrian.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
17	antrian.pkmpstred.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
18	api-bpn.cirebonkab.go.id.	103.212.211.69	Aplikasi		Aktif
19	apicaruban.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183			Non Aktif
20	arjawinangunkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Kecamatan	Aktif
21	arsip.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Website	Disarpus	Aktif
22	arsipweb.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134	Website	Diskominfo	Aktif
23	arsipweb2016.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134	Website	Diskominfo	Aktif
24	arsipweb2022.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134	Website	Diskominfo	Aktif
25	aset.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
26	astanajapura.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Website	Kecamatan	Non Aktif
27	astanajapura.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
28	atcs.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi	Diskominfo	Non Aktif
29	backend-surat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,167			Non Aktif
30	backup.cirebonkab.go.id.	103.212.211.53	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
31	backupidc.cirebonkab.go.id.	103.148.189.78	Aplikasi	Diskominfo	Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
32	bakesbangpol.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Website	Bakesbangpol	Aktif
33	balad.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
34	balikjeh.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Aplikasi	Diskominfo	Non Aktif
35	bapenda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Website	Bappenda	Non Aktif
36	bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170	Website	Bappelitbangda	Aktif
37	bappenda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Website	Bappenda	Aktif
38	baridin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Setda	Non Aktif
39	bb.disdik.cirebonkab.go.id.	103.212.211.36			Non Aktif
40	beberkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website	Kecamatan	Aktif
41	bilikyanlik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
42	bima.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
43	bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	BKAD	Aktif
44	bkppd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Website		Non Aktif
45	bkppd-siap.cirebonkab.go.id.	103,212,211,250			Non Aktif
46	bkpsdm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Bkpsdm	Aktif
47	blender.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
48	bmd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,136			Non Aktif
49	bmdold.cirebonkab.go.id.	103,212,211,137			Non Aktif
50	bojongkulon.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
51	bok.dinkes.cirebonkab.go.id.	103,212,211,189	Aplikasi	Dinkes	Aktif
52	booster.cirebonkab.go.id.	103,212,211,178	Aplikasi	Bappenda	Aktif
53	bop.disdik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
54	bosda.disdik.cirebonkab.go.id.	103.212.211.36			Non Aktif
55	bpbd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Website	Bpbd	Aktif
56	bppt.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Website	Bppt	Aktif
57	bpsk.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170	Website	Bpsk	Aktif
58	bringin.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Desa	Aktif
59	budur.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Desa	Aktif
60	bukutamu.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi	Setda	Aktif
61	buntet.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
62	cashregister.cirebonkab.go.id.	103.212.211.18			Non Aktif
63	cctv-backend.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
64	ciawijapura.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
65	cibogo.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
66	cika.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
67	cikadigi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,163	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
68	ciledugkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Kecamatan	Aktif
69	cinofest.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website	Bappelitbangda	Non Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
70	ciperna.pkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Puskesmas	Aktif
71	cipeujeuhwetan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
72	cirebonkaton.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Website		Aktif
73	ciremai.cirebonkab.go.id.	103,212,211,225			Non Aktif
74	citemu.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
75	ciwaringin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	website	Kecamatan	Aktif
76	ciwaringin.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Desa	Aktif
77	cloudfront.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134			Aktif
78	cloudpanel.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
79	cp.dpmptsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi		Aktif
80	csr.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Setda	Aktif
81	cumi-cumi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
82	curug.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
83	damkar.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Damkar	Aktif
84	dapda.cirebonkab.go.id.	103.212.221.18			Non Aktif
85	dashboard-bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,180	Aplikasi		Aktif
86	dashboard-data.cirebonkab.go.id.	103,212,211,166	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
87	data.cirebonkab.go.id.	103,212,211,219	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
88	data.kelautan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183	Aplikasi		Aktif
89	data.satpolpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183			Non Aktif
90	depokkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website	Kecamatan	Aktif
91	desamart.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website		Aktif
92	deskpilkada2024.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Setda	Aktif
93	dev-be.surat.cirebonkab.go.id.	74.50.123.182			Non Aktif
94	dev-fe.surat.cirebonkab.go.id.	74.50.123.182			Non Aktif
95	dev-sikompa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,152			Aktif
96	dev-sipiter.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Diskominfo	Non Aktif
97	dev-surat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,221			Aktif
98	dev-webdinas.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Diskominfo	Non Aktif
99	dev.esign-service.cirebonkab.go.id.	103,212,211,210	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
100	dev.kab.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Diskominfo	Non Aktif
101	devpkl.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Diskominfo	Non Aktif
102	devsdm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Diskominfo	Non Aktif
103	digiprom.cirebonkab.go.id.	103,212,211,187	Aplikasi		Aktif
104	dinkes.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Dinkes	Aktif
105	dinsos.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website		Aktif
106	disarpus.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Website		Aktif
107	disbudpar.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
108	disdik.cirebonkab.go.id.	103.212.211.34	Website		Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
109	disdik.bmd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,136			Non Aktif
110	disdukcapil.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
111	dishub.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website		Aktif
112	diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
113	disnaker.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
114	disnakertrans.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183	Website		Aktif
115	disperdagin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,198	Website		Aktif
116	dispora.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website		Aktif
117	distan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,161	Website		Aktif
118	diujiken.cirebonkab.go.id.	103,212,211,147	Aplikasi		Aktif
119	dlh.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
120	dnsmanager.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
121	dokling.blhd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
122	dpkpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,133	Website		Aktif
123	dpmd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website		Aktif
124	dpmptsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
125	dppkb.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website		Aktif
126	dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
127	dukupuntangkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
128	e-clinic.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
129	e-krp.dishanpang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183			Non Aktif
130	ebangkom.cirebonkab.go.id.	103,212,211,143	Aplikasi		Non Aktif
131	edi.disdik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,232			Non Aktif
132	edrafting.jdih.cirebonkab.go.id.	103,212,211,154	Aplikasi		Aktif
133	ekg.dishanpang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,179			Non Aktif
134	ekinerja.cirebonkab.go.id.	103,212,211,157	Aplikasi		Aktif
135	ekliping.cirebonkab.go.id.	103,212,211,198			Non Aktif
136	elmu.cirebonkab.go.id.	103,212,211,143			Non Aktif
137	emr.cirebonkab.go.id.	103,212,211,182	Aplikasi		Aktif
138	ender.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
139	eplanning.cirebonkab.go.id.	103,212,211,244			Non Aktif
140	eretribusipasar.cirebonkab.go.id.	103.212.211.60	Aplikasi		Aktif
141	erpas.cirebonkab.go.id.	103,212,211,186	Aplikasi		Aktif
142	esakip.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Aplikasi		Aktif
143	esign-service.cirebonkab.go.id.	103,212,211,211	Aplikasi		Aktif
144	esign.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
145	esurat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,167	Aplikasi	Setda	Aktif
146	fms.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
147	foodiary.dinkes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.14			Non

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
					Aktif
148	galericaruban.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183	Website		Aktif
149	gebangmekar.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
150	gegesik.pkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
151	gegesikkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
152	gempolkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170	Website		Aktif
153	geodashboard.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
154	geoportal.cirebonkab.go.id.	103,212,211,181	Aplikasi		Aktif
155	gis.dpmptsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183	Aplikasi		Aktif
156	gitlab.cirebonkab.go.id.	103,212,211,224	Aplikasi		Aktif
157	gregekkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
158	gunungjati.cirebonkab.go.id.	103,212,211,248	Website		Non Aktif
159	harga.dishanpang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,152	Aplikasi		Non Aktif
160	helpdesk.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
161	hibahbansos.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi		Aktif
162	i-bop.disdik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,186			Non Aktif
163	ibi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,152	Website	Dinkes	Aktif
164	incucaruban.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
165	infobang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
166	infonaker.cirebonkab.go.id.	103,212,211,206			Non Aktif
167	inspektorat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
168	inspektorat2.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
169	ip.cirebonkab.go.id.	103,212,211,151			
170	isunkaton.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Aplikasi		Aktif
171	izinonline.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi		Aktif
172	jadwal.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
173	jadwal.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
174	jadwal.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
175	jagapurakidul.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
176	jamblang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233			Non Aktif
177	jamblangkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
178	japurabakti.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
179	jatiseengkidul.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
180	jdi.h.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
181	jdi.h.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Website		Aktif
182	jendela-data.cirebonkab.go.id.	103,212,211,166			Non Aktif
183	jungjang.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
184	kaligawe.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
185	kaligawewetan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
186	kalikoa.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
187	kalitengah.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
188	kaliwulu.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
189	karanganyarkarangwareng.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
190	karangasem.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
191	karangmangu.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
192	karangreja.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
193	karangsari.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
194	karangsembung.pkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Website		
195	karangsembungkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
196	karangwangikarangwareng.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
197	karangwangun.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
198	karangwareng.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
199	karangwarengkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
200	katalapps.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi		Aktif
201	kebarepan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
202	kedawung.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
203	kedawungkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
204	kedongdong.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
205	kemantren.kelurahan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website		Aktif
206	kendal.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
207	kepokmas.cirebonkab.go.id.	103,212,211,214	Aplikasi		Aktif
208	keuangandes.cirebonkab.go.id.	103.81.246.149	Website	Dpmd	Aktif
209	keycloak.cirebonkab.go.id.	103,212,211,155	Aplikasi		Aktif
210	klangenankec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
211	koni.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Website		Aktif
212	koperasi.umkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,179			Non Aktif
213	koppikaton.inspektorat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
214	korpri.cirebonkab.go.id.	103,212,211,208	Website		Aktif
215	kpa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
216	ktpel.cirebonkab.go.id.	103.212.211.19	Aplikasi		Non Aktif
217	labkesda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233			Non Aktif
218	layanan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,155	Aplikasi		Aktif
219	lemahabangkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
220	litbang.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
221	localhost.cirebonkab.go.id.	127.0.0.1			
222	lppd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
223	lungbenda.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
224	mail.cirebonkab.go.id.	103.212.211.58	Aplikasi		Aktif
225	matangaji.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
226	mekarsari.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
227	metadata.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103.212.211.59			Non

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
					Aktif
228	mitigasi.bpbdd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
229	mms.dprdd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
230	moncer.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
231	monevdes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
232	mpk.cirebonkab.go.id.	103,212,211,236	Aplikasi		Non Aktif
233	msm.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
234	msm.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
235	msm.bkpsdm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Aplikasi		Non Aktif
236	msm.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
237	msm.disnaker.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
238	msm.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233			Non Aktif
239	msm.dprdd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
240	msm.inspektorat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Aplikasi		Aktif
241	msm.sumberkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
242	mundukec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
243	munjul.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
244	mx1.cirebonkab.go.id.	103.212.211.58			
245	mx2.cirebonkab.go.id.	172,104,173,199			
246	netmon.cirebonkab.go.id.	103,212,211,139	Aplikasi		Aktif
247	notulen.dprdd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Aplikasi		Aktif
248	ns1.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247			
249	ns2.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134			
250	ns2-web-svc.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134			
251	ns3.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			
252	old.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134	Website		Aktif
253	opendata.cirebonkab.go.id.	103,212,211,219	Aplikasi		Aktif
254	opendk.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
255	openkab.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi		Aktif
256	opensid.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
257	ortala.cirebonkab.go.id.	103.212.211.19	Website		Aktif
258	palimananbarat.desa.cirebonkab.go.id.	103.212.211.11	Website	Desa	Aktif
259	palimanankec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
260	pamengkang.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
261	panambangan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
262	pangenankec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
263	panguranganwetan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
264	pasalemankec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
265	pasawahan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
266	paseban.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
267	paten.suranenggalakec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,139			Non Aktif
268	pegagan.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
269	pelantikan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,172	Aplikasi		Aktif
270	pemantaukebakaran.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
271	pemerintahan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
272	pendapatan.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
273	penerimaantamu.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
274	pengamanan.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
275	pengawasan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,156	Aplikasi		Aktif
276	pengawasan.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
277	penyaluranbantuan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
278	penyaluranbantuan.cirebonkab.go.id.	203.175.9.175	Aplikasi		Aktif
279	perencanaan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,156	Aplikasi		Aktif
280	perpustakaan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,185	Aplikasi		Aktif
281	perpustakaanonline.cirebonkab.go.id.	103,212,211,159			Non Aktif
282	persediaan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,228			Non Aktif
283	pkmplered.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
284	pkmplumbon.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website		Aktif
285	pleredkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
286	plumbon.pkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
287	plumbonkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website		Aktif
288	pmionline.disnakertrans.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183			Non Aktif
289	pmks.cirebonkab.go.id.	103,212,211,217	Aplikasi		Non Aktif
290	polrestacirebon.cirebonkab.go.id.	103.212.211.82			Non Aktif
291	portal-asn.cirebonkab.go.id.	103,212,211,155			Non Aktif
292	potensi.disperindag.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
293	potensi.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Website		Aktif
294	ppdbbmp.disdik.cirebonkab.go.id.	103.30.244.69	Aplikasi		Aktif
295	ppid.cirebonkab.go.id.	103,212,211,172	Website		Aktif
296	ppks.cirebonkab.go.id.	103,212,211,217	Aplikasi		Aktif
297	presensi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233			Non Aktif
298	privacypolicy.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Website		Aktif
299	proguldes.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170			Non Aktif
300	prokompim.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website		Non Aktif
301	pspp.cirebonkab.go.id.	103.212.211.37			Non Aktif
302	public-dns.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
303	pupr.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
304	purbawinangun.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
305	pwi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website		Aktif
306	report-lpse.cirebonkab.go.id.	103,212,211,240	Aplikasi		Aktif
307	reportizin.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
308	risalah.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
309	rkpdes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
310	rsudarjawinangun.cirebonkab.go.id.	36.66.31.42			Non Aktif
311	rtik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,164			Non Aktif
312	ruangan.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
313	rujukan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,213			Non Aktif
314	s-idea.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207			Non Aktif
315	sakip.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi		Aktif
316	sampih.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
317	sarasa.karangsembung.cirebonkab.go.id.	103.212.211.59			Non Aktif
318	saseda.disdik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,186			Non Aktif
319	satpolpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
320	satpolpp.v1.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239			Non Aktif
321	satudata.cirebonkab.go.id.	103,212,211,219	Aplikasi		Aktif
322	sd.disdik.cirebonkab.go.id.	103.212.211.38			Non Aktif
323	sebangsakabeh.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
324	secondary-ns.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
325	selter.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188			Non Aktif
326	setara.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
327	setda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website		Aktif
328	siap-parkir.cirebonkab.go.id.	103,212,211,186			Non Aktif
329	siap.bkppd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,250	Website		Aktif
330	siapsarpras.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi		Aktif
331	sibangkom.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
332	siber-satpolpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi		Aktif
333	sicepak.suranenggala.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207			Non Aktif
334	sicsr.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170			Non Aktif
335	sid.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
336	sidadap.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
337	sidakan.dkpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
338	sidakdpkpp.cirebonkab.go.id.	103.212.211.22			Non Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
339	sidamulya.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
340	sidapok.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,138	Aplikasi		Aktif
341	side.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
342	sidewikaton.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
343	sigap.cirebonkab.go.id.	103.212.211.6			Non Aktif
344	sigi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,229			Non Aktif
345	siida.disperdagin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,141			Non Aktif
346	siindah.disperdagin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,141			Non Aktif
347	sijabur.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239			Non Aktif
348	sijakda.putr.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Aplikasi	Putr	Aktif
349	sijapati.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
350	sikaton.cirebonkab.go.id.	103.212.211.29	Aplikasi		Aktif
351	sikatonblud.cirebonkab.go.id.	103.212.211.28	Aplikasi		Aktif
352	sikd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,193	Aplikasi	Disarpus	Aktif
353	sikepang.bkpsdm.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
354	sikla.cirebonkab.go.id.	103,212,211,140			Non Aktif
355	sikompa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,152	Aplikasi	Dishanpang	Aktif
356	sikonda.bakesbangpol.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Bakesbangpol	Aktif
357	sikpkp.dislahan.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
358	silabkeja.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
359	silais.cirebonkab.go.id.	103.212.211.37	Aplikasi	Disdik	Aktif
360	silaras.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Aktif
361	silda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	DLH	Aktif
362	simadu-sejiwa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Aktif
363	simapen.bkpsdm.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52	Aplikasi		Non Aktif
364	simasda.dprd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,215	Aplikasi	DPRD	Aktif
365	simbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,200			Non Aktif
366	simbudpar.cirebonkab.go.id.	103,212,211,172			Non Aktif
367	simdes-kalimeang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
368	simdes-karangmalang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
369	simdes-karangsembung.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
370	simdes-kubangkarang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
371	simdes-tambelang.cirebonkab.go.id.	103,212,211,245			Non Aktif
372	simdes.lebakmekar.cirebonkab.go.id.	103,212,211,196			Non Aktif
373	simejawili.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Putr	Aktif
374	simhp.inspektorat.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
					Aktif
375	simila.cirebonkab.go.id.	103,212,211,186	Aplikasi	Disdik	Aktif
376	simiskinrangga.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103.212.211.13	Aplikasi		Aktif
377	simister.cirebonkab.go.id.	103,212,211,129	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
378	simister-dashboard.cirebonkab.go.id.	103,212,211,129	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
379	simkop.cirebonkab.go.id.	103,212,211,163			Non Aktif
380	simo.dinkes.cirebonkab.go.id.	103,212,211,197	Aplikasi	Dinkes	Aktif
381	simoncer.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
382	simonek.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	BKAD	Aktif
383	simpad.cirebonkab.go.id.	103.212.211.69	Aplikasi	Bapenda	Aktif
384	simpaten.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
385	simpbj.cirebonkab.go.id.	103,212,211,194	Aplikasi		Aktif
386	simpeg.cirebonkab.go.id.	103,212,211,142	Aplikasi	Bkpsdm	Aktif
387	simpeg.losarikec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
388	simpeg.rsudwaled.cirebonkab.go.id.	103,212,211,246	Aplikasi	RSUDWALED	Aktif
389	simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,133	Aplikasi	DPKPP	Aktif
390	simrs.awn.cirebonkab.go.id.	202.180.21.44	Aplikasi		Non Aktif
391	simugi.cirebonkab.go.id.	103,212,211,176	Aplikasi	BKAD	Aktif
392	simwasda.inspektorat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,168	Aplikasi	Inspektorat	Aktif
393	sinta.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Bkpsdm	Aktif
394	sintren.cirebonkab.go.id.	103.212.211.19			Non Aktif
395	sintren.disdukcapil.cirebonkab.go.id.	103.212.211.19			Non Aktif
396	siormas.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Bakesbangpol	Aktif
397	sipas.setda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Setda	Aktif
398	sipd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,162	Aplikasi		Aktif
399	sipeaktime.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Putr	Aktif
400	sipedes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.60	Aplikasi	Dpmd	Aktif
401	sipeka.cirebonkab.go.id.	103,212,211,234	Aplikasi	Bkpsdm	Aktif
402	sipepeg.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Dinsos	Aktif
403	sipepek.cirebonkab.go.id.	103,212,211,182	Aplikasi	Dinsos	Non Aktif
404	sipiter.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
405	sipjeh.cirebonkab.go.id.	103.212.211.69	Aplikasi	Bapenda	Aktif
406	sipkd.cirebonkab.go.id.	103.212.211.27			Non Aktif
407	siponline.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207			Non Aktif
408	siponline.dinkes.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170			Non Aktif
409	sipor.koni.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Website	Koni	Aktif
410	sipp.cirebonkab.go.id.	103.212.211.22	Aplikasi		Non Aktif
411	sipuji.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Putr	Aktif
412	siraos.cirebonkab.go.id.	103.212.211.30	Aplikasi		Non

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
					Aktif
413	siretro.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi		Non Aktif
414	sirup.cirebonkab.go.id.	103,212,211,251	Aplikasi	Setda	Aktif
415	siskeudes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.55	Aplikasi	Dpmd	Aktif
416	sismadak.rsawn.cirebonkab.go.id.	103,212,211,142			Non Aktif
417	siswaskeudes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.61	Aplikasi	Dpmd	Aktif
418	sitara.disdik.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Disdik	Aktif
419	sitarling.jdih.cirebonkab.go.id.	103,212,211,154	Aplikasi	Setda	Aktif
420	sitenger.cirebonkab.go.id.	103,212,211,212	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
421	siterasi.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,239	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
422	siterusmi.dinkop.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
423	siumi.dinkop.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Dinkop	Non Aktif
424	siwasprokar.damkar.cirebonkab.go.id.	103,212,211,183	Aplikasi	Damkar	Aktif
425	skp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,250			Non Aktif
426	slrt.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
427	smartbranding.cirebonkab.go.id.	103,212,211,224	Website	Diskominfo	Non Aktif
428	smartcity.cirebonkab.go.id.	103,212,211,224	Website	Diskominfo	Non Aktif
429	spbe.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Diskominfo	Aktif
430	spidol.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
431	sppd.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi		Aktif
432	sso.cirebonkab.go.id.	103,212,211,179	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
433	standarpelayanan.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
434	status.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Aplikasi	Diskominfo	Non Aktif
435	store.dwp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	DWP	Aktif
436	sucadenik.cirebonkab.go.id.	103.212.211.52			Non Aktif
437	sumberkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Kecamatan	Aktif
438	superadmin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,234			Non Aktif
439	suranenggalakec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170	Website	Kecamatan	Aktif
440	surat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,167	Aplikasi		Aktif
441	surat.bappeda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Aplikasi		Non Aktif
442	surat.bappelitbangda.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Aplikasi		Non Aktif
443	surat.ciwaringinkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,237	Aplikasi		Non Aktif
444	surat.disperdagin.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Aplikasi		Non Aktif
445	surat.gempolkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,170	Aplikasi		Non Aktif
446	surat.gregedkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Aplikasi		Non Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
447	surat.pabuarankec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,195	Aplikasi		Non Aktif
448	surat.suranenggalakec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,195	Aplikasi		Non Aktif
449	survey.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi		Non Aktif
450	susukanagung.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
451	susukantonggoh.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
452	sutawinangun.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
453	talun.pkm.cirebonkab.go.id.	103,212,211,247	Website	Puskesmas	Aktif
454	talunkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Kecamatan	Aktif
455	tanjunganom.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
456	tauval.kcs.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Aplikasi	Setda	Aktif
457	tegalgubug.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Desa	Aktif
458	tegalsari.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
459	temanpustaka.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227	Aplikasi	Disarpus	Aktif
460	tengahtani.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218	Website	Kecamatan	Non Aktif
461	tengahtanikec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,233	Website	Kecamatan	Aktif
462	tiliki.cirebonkab.go.id.	103,212,211,241	Aplikasi		Non Aktif
463	tlhp.inspektorat.cirebonkab.go.id.	103,212,211,188	Aplikasi	Inspektorat	Aktif
464	tnde.cirebonkab.go.id.	103,212,211,173	Aplikasi		Aktif
465	tower.diskominfo.cirebonkab.go.id.	103,212,211,227			Non Aktif
466	trusmikulon.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
467	tuk.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,226	Website	Desa	Aktif
468	ulp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,228	Aplikasi		Aktif
469	umkm.dinkop.cirebonkab.go.id.	103.212.211.45			Non Aktif
470	v1.sipepek.cirebonkab.go.id.	103.212.211.43	Aplikasi	Dinsos	Aktif
471	v2.cirebonkab.go.id.	103,212,211,134			Non Aktif
472	v2.dpmpstsp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,218			Non Aktif
473	vaksinasi.cirebonkab.go.id.	103.212.211.45			Non Aktif
474	verifikasi.bkad.cirebonkab.go.id.	103,212,211,203	Aplikasi	BKAD	Aktif
475	vps.cirebonkab.go.id.	103.212.211.10			Non Aktif
476	waledkec.cirebonkab.go.id.	103,212,211,146	Website	Kecamatan	Aktif
477	wargabinangun.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
478	warujaya.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
479	webmail.sipedes.cirebonkab.go.id.	103.212.211.60	Aplikasi	Dpmd	Aktif
480	werulor.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
481	whatsapp.cirebonkab.go.id.	103,212,211,235	Aplikasi	Diskominfo	Aktif
482	widasari.posyandu.cirebonkab.go.id.	103.212.211.12			Non Aktif
483	wilulang.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif
484	wotgali.desa.cirebonkab.go.id.	103,212,211,207	Website	Desa	Aktif

No	Domain/Subdomain	IP	Jenis	Pemilik	Keadaan
485	zibanting.cirebonkab.go.id.	103,212,211,206	Aplikasi	Dinkes	Aktif

Sumber : Diskominfo, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Website dan aplikasi yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten Cirebonkab atau dengan domain / subdomain *cirebon.go.id* sebagai berikut :

- jumlah aplikasi atau website kabupaten cirebon memiliki jumlah 485 aplikasi dan website.
- Website yang tersebar di seluruh OPD berjumlah 171 Baik Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa
- Apliasi yang tersebar di seluruh OPD berjumlah 182 Baik Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa
- dan 132 aplikasi dan website masih maintenence (perbaikan) masih proses perbaikan

9. Surat Menyurat Elektronik (*E-Office*)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

10. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar perangkat daerah untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik.

11. Hotspot Area Publik

Untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan akses WiFi gratis (*free hotspot*) pada beberapa ruang terbuka publik di beberapa titik strategis wilayah Kabupaten Cirebon. Titik pelayanan akses internet gratis bagi masyarakat dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 2.16

Data Sebaran Hotspot Area Publik Tahun 2025

No	Nama	Infrastruktur	Tahun Pembangunan
1	Alun alun ciledug	Radio Wireless	2018
2	Alun alun palimanan	Radio Wireless	2018
3	Kec. Arjawinangun	Radio Wireless	2018
4	Kec. Babakan	Radio Wireless	2018
5	Kec. Ciwaringin	Radio Wireless	2018
6	Kec. Depok	Radio Wireless	2018
7	Kec. Gunungjati	Radio Wireless	2018
8	Kec. Karangsembung	Radio Wireless	2018
9	Kec. Klangenan	Radio Wireless	2018
10	Kec. Lemahabang	Radio Wireless	2018
11	Kec. Panguragan	Radio Wireless	2018
12	Kec. Plered	Radio Wireless	2018
13	Kec. Plumbon	Radio Wireless	2018
14	Kec. Sumber	Radio Wireless	2018
15	Kec. Suranenggala	Radio Wireless	2018
16	RS. Waled	Radio Wireless	2018
17	Taman PKK Sumber	Radio Wireless	2019
18	Wisata Ambulu Losari	Radio Wireless	2019
19	Wisata Batu Lawang Cupang	Radio Wireless	2019
20	Masjid Agung Sumber	Fiber Optik	2021
21	Uji KIR Dishub	Radio Wireless	2021
22	UPT Terminal Sumber	Radio Wireless	2021
23	Wisata Batik Trusmi	Radio Wireless	2021
24	Desa Kubangdeleg	Radio Wireless	2023
25	Desa Kedung Jaya	Radio Wireless	2024
26	Kec. Pangenan	Radio Wireless	2024

Pada tabel diatas menunjukan bahwa kabupaten Cirebon memiliki radio wireless yang tersebar di berbagai dengan suport dukungan oleh diskominfo sebagai hotspot area publik di kabupaten cirebon sebagai berikut :

- jumlah radio wireless yang mendukung untuk hotspot area Publik berjumlah 26 yang masih aktif yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten cirebon.

12. *Help Desk* PPID dan Sengketa Informasi

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon untuk melakukan mediasi

13. Fasilitasi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

14. *Learning Center*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah membangun *Learning Center* yang bertempat di gedung Data Center sebagai sarana ruangan Bimtek IT. Namun sarana dan prasarana penunjang *Learning Center* perlu ditingkatkan lagi seperti penambahan perangkat komputer dan ruangan yang lebih representatif lagi dan akan diusulkan pengembangannya di Tahun mendatang.

15. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Salah satu layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan telekomunikasi. Keberadaan sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan pendidikan. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan data/internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil segera dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus mempercepat pembangunan

nasional yang dilaksanakan pemerintah. Dilihat dari luas wilayah, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon mencapai 100 %. Di Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2018 baru terdapat 417 buah menara telekomunikasi yang tersebar di 40 kecamatan. Tabel data sebaran MT di Kabupaten Cirebon.

Di Kabupaten Cirebon terdapat 18 (sebelas) perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan/penyewaan menara telekomunikasi (tower provider). Menara tersebut umumnya diperuntukkan penempatan BTS milik perusahaan itu sendiri maupun disewakan kepada operator telekomunikasi (telco operator) lain. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.17
Data provider yang beroperasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2025

NO	NAMA
1	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA
2	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
3	PT. EPID MENARA ASSET.Co
4	PT. GAMETRACO TUNGGAL
5	PT. GLOBAL TEKNOLOGI INTEGRASI
6	PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON
7	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA
8	PT. MENARA SELARAS PERSADA
9	PT. PERMATA KARYA PERDANA
10	PT. PERSADA SOKKA TAMA
11	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
12	PT. SMARTFREN TELEKOMUNIKASI
13	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA
14	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA
15	PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA
16	PT. TELKOMSEL
17	PT. TOWER BERSAMA GROUP
18	PT. XL AXIATA, Tbk

3.2. Kinerja Pelayanan Statistik

Pelaksanaan urusan Statistik mulai dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017 yang sebelumnya dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan urusan statistik yang dimaksud merupakan

pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data statistik yang bersifat sektoral. Urusan Statistik tersebut bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.

3.3. Kinerja Pelayanan Persandian

Sebelum terbitnya Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, urusan persandian dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksananya masih terbatas pada pengelolaan berita yang masuk dan keluar yang bersifat rahasia atau terbatas.

D. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran pelayanan sebagai peluang pengembangan pelayanan dinas komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. SKPD di lingkungan kabupaten cirebon meliputi :

- pelayanan jaringan internet setiap OPD Kabupaten Cirebon yang terfasilitasi oleh Diskominfo
- pelayanan pusat data pemerintahan yang terpusat di server data Diskominfo
- terfasilitasinya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- pengamanan kegiatan OPD dengan penyediaan layanan keamanan informasi yang teramankan
- Memfasilitasi kegiatan statistik sektoral di setiap OPD oleh Diskominfo.
- Tersedianya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon.

2. Badan pusat statistik sebagai pembina kegiatan statistik sektoral

E. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara tingkat Provinsi maupun Nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik dan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara. Penelahaan terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan Renstra Kementerian/Lembaga.

1. ASTA CITA

"ASTA CITA" Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia" Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai

3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 2.18
Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Teknologi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	
6	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
7	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

Tabel 2.19
Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Kab Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE
	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah		Meningkatnya keterbukaan informasi publik
Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
Penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
	Meningkatnya konektivitas layanan pos		
	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional		
	Meningkatnya pemanfaatan spectrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Bedasarkan Tabel 3.2 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025- 2029 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024. Adapun untuk Tujuan “Penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia” berikut sasarannya merupakan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik

Tabel 2.20
Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah daerah provinsi jawa Barat	Program Informasi Komunikasi Publik
2	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika
3	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5	Meningkatnya kualitas persandian dan keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel 2.21
Sandingan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Jabar
dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029

Renstra Diskominfo Jabar Tahun 2024-2026		Renstra Diskominfo Kab Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah daerah provinsi jawa Barat	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik
	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
	Meningkatnya kualitas persandian dan keamanan informasi		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

4. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020- 2024 menetapkan Visi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 yaitu:

“menjadi Lembaga Statistik Berkelas Dunia yang Andal, Independen, dan terpercaya untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden Terpilih”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

- 1. Berkelas Dunia
Menjalankan Kegiatan Statistik dengan menerparkan Best Practies Sesuai standar nasional dan iternasional, inovativ dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini serta berbasis Ekonomi.
- 2. Andal
Menghasilkan statistik resmi yang lengkap, akurat, konsisten dan mampu memberikan insight bagi pengguna dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan pemerintah.
- 3. Independen
Menjunjung tinggi Objektivitas dan tidak memihak kepada siapa pun dalam melaksanakan kegiatan statistik untuk mewujudkan sistem statistik Nasional yang andal, efektif dan Efisien
- 4. Terpercaya
Memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi serta menjadi rujukan utama data statistik di tingkat Nasional dan internasional sebagai konsekuensi logis dari tata kelola, profesionalisme dan kapabilitas kelembagaan yang kuat serta regulasi yang mendukung.

Tabel 2.22
Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun
2025 – 2029

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029		Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Memberikan insights untuk penguatan kebijakan Nasional melalui penyediaan Statistik berkualitas berbasis teknologi adaptif	penguatan insights berdasarkan data statistik berkualitas sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
Mewujudkan citra Kelembagaan BPS yang Kuat	penguatan citra kelembagaan BPS	-	-

Mewujudkan Kelambagaan Statistik berkelas Dunia yang didukung oleh SDM berAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan berkolaboratif) dan berdaya saing Global (bertaraf Internasional	Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan	-	-
--	---	---	---

Bedasarkan Tabel 2.22 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029

5. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 mengedepankan pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.23
*Tujuan dan Sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2020 -2024*

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya kedaulatan keamanan Siber Indonesia	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia
		Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima

Tabel 2.24
*Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN dengan Renstra
Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029*

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya kedaulatan keamanan Siber Indonesia	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi
	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima		

Bedasarkan Tabel 2.24 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024.

F. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatwen Cirebon Tahun 2024-2044, sehubungan dengan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka perlu

adanya penataan sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam RTRW, melalui arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang direncanakan pada pasal 17 ayat (1) berisi tentang sistem jaringan prasarana telekomunikasi terdiri atas jaringan tetap dan Jaringan bergerak, jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak. Pada pasal 17 ayat (1) juga disebutkan bahwa jaring meliputi:

1. Jaringan Tetap tersebar diseluruh Kecamatan
2. Jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler
3. Jaringan bergerak seluler disebar keseluruh kecamatan.
4. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Daerah ini,

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang serta pembangunan

1. Kawasan di sekita sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c terdiri atas
 - a. kawasan jaringan tetap dan
 - b. kawasan disekitar jaringan bergerak seluler.
2. Kawasan disekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup a disusun dengan ketentuan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan operaional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap ; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau :
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang disekitar jaringan tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggaran jaringan tetap :
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengtan ketentuan peraturan perundang – undangan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan tetap :

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai jaringan telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi undang – undang, mengubah sebagai muatan undang – undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang, yaitu menyebutkan bahwa penataan Ruang wilayah Nasional, Penataan Ruang Ruang wilayah Provinsi, dan Penataan Ruang wilayah Kabupaten / Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk penataan jaringan komunikasi. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan fiber optik yang juga memerlukan pemanfaatan RT/RW. Terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta fungsi penunjang pemerintahan yang akan berdampak strategis terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

G. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYA

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.
Target dan realisasi Anggaran
Periode 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	5.405.314.392	5.983.975.717	6.360.782.570	6.515.194.610	-	4.912.406.118	5.635.020.140	5.738.495.927	5.781.030.580	-	91%	94%	90%	89%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.628.900	-	-	-	-	806.260.749	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	292.700.000	359.550.192	349.348.352	370.998.500	455.699.600	291.132.341	355.634.078	328.933.310	351.783.286	391.061.939	99%	99%	94%	95%	86%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	11.865.000	11.302.000	11.302.000	6.930.500	-	11.865.000	5.882.500	5.605.900	6.071.800	-	100%	52%	50%	88%	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.900.000	-	-	-	-	4.900.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	39.970.000	48.004.500	50.010.200	43.120.600	50.915.100	39.970.000	47.999.500	50.010.200	43.120.600	50.915.100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.982.400	9.213.000	14.266.500	14.266.300	16.008.100	7.982.400	9.213.000	14.266.500	14.266.300	16.008.100	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	3.000.000	2.385.000	2.385.000	6.001.000	8.264.900	3.000.000	2.385.000	2.385.000	6.001.000	8.264.900	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.414.000	74.639.000	88.821.920	208.988.100	208.167.940	12.414.000	74.639.000	88.821.920	200.732.420	206.713.290	100%	100%	100%	96%	99%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.600.000	2.466.000	2.693.400	5.184.500	5.873.400	2.900.000	2.466.000	2.693.400	5.184.500	5.873.400	81%	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.816.000	25.345.500	26.958.000	26.958.000	28.675.800	24.816.000	24.868.000	25.138.189	25.122.500	28.672.000	100%	98%	93%	93%	100%
11	Penyediaan makanan dan minuman	920.000	-	-	-	-	920.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	46.461.500	26.940.450	41.765.850	108.888.900	100.724.200	46.461.008	26.940.450	41.756.850	108.870.012	100.724.200	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	180.000.000	434.512.000	438.229.800	360.000.000	360.000.000	179.900.000	433.573.407	437.115.423	345.420.000	345.600.000	100%	100%	100%	96%	96%
14	fasilitas Kunjungan Tamu	-	1.200.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	-	1.200.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	100%	100%
15	penyediaan Bahan Logistik kantor	-	900.000	1.500.000	-	-	-	900.000	1.500.000	-	-	-	100%	100%	-	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.040.000	-	-	-	-	147.677.517	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Pengadaan mebeleur	7.000.000	6.996.000	-	31.820.370	91.094.370	7.000.000	6.996.000	31.820.370	-	90.250.000	100%	100%	-	100%	99%
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	62.140.000	-	-	-	317.148.000	61.777.517	-	-	-	266.908.000	99%	-	-	-	84%
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78.900.000	81.375.000	77.380.000	118.527.000	2.015.000	78.900.000	76.390.000	76.750.000	100.057.900	2.015.000	100%	94%	99%	84%	100%
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	108.459.000	-	-	-	-	102.656.996	-	-	-	-	95%	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	13.200.000	15.840.000	21.330.000	-	-	13.200.000	15.840.000	21.330.000	-	-	100%	100%	100%	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	38.529.345	-	-	-	-	38.529.345	-	-	-	-	100%	-	-
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.674.700	-	-	-	-	82.265.700	-	-	-	-	97%	-	-	-	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.802.800	44.513.950	48.499.450	48.147.400	122.403.000	42.802.800	44.513.500	48.499.450	48.147.400	123.033.400	100%	100%	100%	100%	101%
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	31.181.900	32.010.000	33.999.900	74.895.800	-	31.172.900	32.010.000	33.999.900	74.891.792	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	10.690.000	11.001.900	12.999.900	13.000.000	-	8.290.000	11.001.900	12.999.900	13.000.000	-	78%	100%	100%	100%	-
4	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.183.315.000	4.683.999.700	4.711.715.000	4.417.930.500		3.706.148.883	4.332.908.083	4.158.467.451	3.858.926.341	-	89%	93%	88%	87%
V	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	42.853.800	-	-	-	-	42.853.550	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	42.853.800	36.444.900	43.946.400	37.526.000	112.174.600	42.853.550	36.444.900	43.946.400	37.526.000	91.514.010	100%	100%	100%	100%	82%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		2.943.686.050	2.893.403.900	4.259.555.300	3.878.028.300		2.915.037.104	2.881.549.528	4.249.597.010	3.802.354.300	-	99%	100%	100%	98%
XI	Program Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik	1.558.680.500	-	-	-	-	1.515.645.085					97%	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Konten Informasi Publik	172.893.000	-	-	-	-	170.232.760	-	-	-	-	98%	-	-	-	-
2	penyediaan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik	404.209.200	-	-	-	-	404.007.530	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	230.000.000	-	-	-	-	228.100.000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
4	Penyebarluasan informasi publik melalui media	280.856.400	-	-	-	-	276.499.400	-	-	-	-	98%	-	-	-	-
5	Pengelolaan media komunikasi milik pemerintah	100.734.000	-	-	-	-	97.134.000	-	-	-	-	96%	-	-	-	-
6	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	151.447.900	-	-	-	-	124.206.230	-	-	-	-	82%	-	-	-	-
7	Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian sengketa informasi publil	218.500.000	-	-	-	-	215.465.165	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
8	Perumuasan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	-	-	48.030.400	-	-	-	-	48.022.000	-	-	-	-	100%	-	-
9	Monitoring Opini dan Aspirasi publik	-	-	53.350.000	113.350.000	113.344.400	-	-	53.350.000	113.300.000	113.344.000	-	-	100%	100%	100%
10	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	105.518.200	150.635.800	299.527.800	208.983.800	-	105.622.537	150.448.954	299.242.984	207.406.000	-	100%	100%	100%	99%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	153.800.000	211.603.300	514.144.900	93.737.100	-	153.249.400	211.053.300	510.793.800	92.887.100	-	100%	100%	99%	99%
12	Pelayanan Informasi Publik	-	356.350.900	616.894.700	779.142.300	1.082.564.400	-	355.815.812	616.614.894	777.027.496	1.021.723.600	-	100%	100%	100%	94%
13	Layanan Hubungan Media	-	875.489.050	1.220.935.900	1.783.378.000	1.655.532.000	-	874.387.300	1.220.935.900	1.781.444.680	1.645.532.000	-	100%	100%	100%	99%
14	Penguatan Tata kelola Komisi Informasi di daerah	-	175.683.700	253.665.000	462.327.700	379.426.600	-	174.209.489	253.621.680	462.232.196	379.408.600	-	99%	100%	100%	100%
15	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	120.819.000	109.685.000	207.690.600	344.440.400	-	119.059.960	107.918.000	206.303.846	341.753.000	-	99%	98%	99%	99%
16	penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-		228.603.800	99.994.000		-		219.584.800	99.252.000		-	#DIV/0!	96%	99%	#DIV/0!
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.060.741.220	4.369.786.724	5.986.451.518	7.185.835.938		4.040.576.980	4.362.712.801	5.924.097.397	7.120.317.750	-	100%	100%	99%	99%
VII	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.088.512.200	-	-	-	-	6.942.863.771	-	-	-	-	98%	-	-	-	-
1	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah	50.000.000	-	-	-	-	49.480.000	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
2	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	197.000.000	-	-	-	-	193.695.000	-	-	-	-	98%	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan SDM masyarakat penfguna layanan pemerintah berbasis elektronik	48.271.400	-	-	-	-	48.150.575	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City	154.000.000	-	-	-	-	152.941.488	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
5	Layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah	2.883.596.000	-	-	-	-	2.880.772.996	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
6	Layanan infrastruktur dasar Data Center, disaster recovery center dan TIK	3.207.200.000	-	-	-	-	3.074.034.000	-	-	-	-	96%	-	-	-	-
7	Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	450.000.000	-	-	-	-	446.716.759	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
8	Operasional Cirebon Command Center	98.444.800	-	-	-	-	97.472.953	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
9	Penyelenggaran Sistem Jaringan intra Pemda	-	2.862.395.060	2.885.721.904	2.874.303.973	4.316.928.886	-	2.854.700.596	2.882.450.120	2.867.718.544	4.307.584.700	-	100%	100%	100%	100%
10	Penatalaksanaan dan pengawasan E-governtmen dalam penyelenggraan Pemda Kabupaten / kota	-	131.256.000	119.024.300	270.104.500	215.861.300	-	125.214.800	119.024.300	264.561.685	211.561.300	-	95%	100%	98%	98%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis pemerintahan Berbasis Elektronik	-	159.649.000	202.748.000	607.086.500	599.929.000	-	159.539.000	202.743.680	605.862.996	598.169.250	-	100%	100%	100%	100%
12	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem kabupaten / kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	71.906.000	63.267.050	90.000.000	59.892.400	-	70.447.345	63.128.908	90.000.000	57.942.400	-	98%	100%	100%	97%
13	Pengelolaan Pusat Data pmda	-	355.502.460	716.442.220	1.760.126.845	1.993.224.352	-	355.270.098	714.981.110	1.746.677.988	1.945.060.100	-	100%	100%	99%	98%
14	koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi elektronik	-	64.706.000		75.104.900	-	-	64.683.280		75.104.900	-	-	100%	#DIV/0!	100%	-
15	penyelenggaraan Sistem penghubung layanan Pemerintah	-	184.466.700	295.666.800	309.724.800		-	182.186.814	243.469.553	274.171.284	-	-	99%	82%	89%	-
16	Pengembangan Insfarstuktur	-	95.662.200	114.576.000	-	-	-	95.609.704	114.560.011	-	-	-	100%	100%	-	-
17	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggran pmda kabupaten / kota	-	41.384.000	19.800.000	-	-	-	40.748.826	19.800.000	-	-	-	98%	100%	-	-
18	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemda	-	74.897.200	67.116.450	-	-	-	74.297.200	67.112.130	-	-	-	99%	100%	-	-
19	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pmda	-	86.484.900	-	-	-	-	85.396.180	-	-	-	-	99%	-	-	-
VIII	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	66.705.000					65.486.084					98%	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	66.705.000					65.486.084					98%	-	-	-	-
4	Program Penyelenggraan Statistik Sektoral		626.366.150	319.609.650	606.160.100	791.012.200		603.326.964	318.933.311	599.848.174	750.433.850	-	96%	100%	99%	95%
IX	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	606.529.700	-	-	-	-	599.727.744	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
1	Pengolahan, Updating, analisis Data dan statistik Sektoral	81.970.000	-	-	-	-	81.940.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	325.500.000	-	-	-	-	319.910.000	-	-	-	-	98%	-	-	-	-
3	Pengolahan Data sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	199.059.700	-	-	-	-	197.877.744	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
4	penyelenggaraan Otoritas Statistik Sektoral di daerah	-	37.192.800	172.589.500	566.160.100	791.012.200	-	37.692.800	172.051.000	559.848.174	750.433.850	-	101%	100%	99%	95%
5	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral	-	3.509.300	17.744.150	40.000.000	-	-	3.509.300	17.622.300	40.000.000	-	-	100%	99%	100%	-
6	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	36.629.200	14.700.000		-	-	37.232.600	14.700.000	-	-	-	102%	100%	-	-
5	Program Penyelenggraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		240.391.900	195.884.050	222.754.500	289.823.000		238.790.260	195.875.410	222.510.492	289.910.560	-	99%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun n				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
XI	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	141.231.500	-	-	-	-	132.519.584	-	-	-	-	94%	-	-	-	-
1	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	141.231.500	-	-	-	-	132.519.584	-	-	-	-	94%	-	-	-	-
2	Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten / kota	-	104.262.000	175.146.200	-	289.823.000	-	103.664.893	175.137.560	-	283.910.560	-	99%	100%	-	98%
3	operasi jaring Komunikasi Sandi Pemda Kabupaten	-	57.914.300	20.737.850	222.754.500	-	-	57.802.007	20.737.850	222.510.492	-	-	100%	100%	100%	-
	JUMLAH	10.545.816.300	11.560.792.362	13.590.070.541	17.394.678.388	14.127.865.462	10.335.699.784	11.042.746.059	10.461.638.070	16.661.703.022	13.125.267.440	98%	96%	77%	96%	93%

Pada tabel diatas menunjukkan pagu anggaran dan realisasi anggaran dari Tahun 2020 - 2024 Pada Tahun 2020 - 2021 terdapat kebijakan pemerintah daerah yaitu *refocusing (Efisiensi)* yang mengakibatkan efisiensi anggaran yang berdampak penurunan pagu anggaran. Namun pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan karena disamping masuknya dana PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan). Dan Secara garis besar realisasi anggaran rata-rata tiap Tahun diatas 95%.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 143 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatikaka yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima Tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar

di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan, bisa dilihat terkait tabel permasalahan Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.26
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Tahun 2025

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Digitalisasi Layanan Pemerintah belum dilakukan secara optimal	Tata Kelola regulasi berbasis elektronik belum diimplementasikan dengan baik	Pelaksanaan dari regulasi Perbup SPBE belum diimplementasikan secara optimal dan menyeluruh di Perangkat Daerah
			Masih belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi SPBE dalam pengawasan dan pelaksanaan digitalisasi pemerintahan di Kab. Cirebon
			Perlu adanya dukungan pimpinan daerah secara maksimal dalam penerapan SPBE di Pemkab Cirebon sesuai dengan dokumen perencanaan SPBE
		Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus belum sesuai regulasi	Integrasi dan Interopabilitas aplikasi belum berjalan secara optimal dan menyeluruh di Perangkat Daerah karena kompleksitas permasalahan di masing masing PD
			Proses Pembangunan dan pengembangan aplikasi Perangkat Daerah belum sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta belum sesuai regulasi aplikasi SPBE

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum diterapkan secara optimal superapp untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sebagai gerbang utama pelayanan digital Terbatasnya SDM dan penganggaran dalam peningkatan sistem informasi pemerintahan secara maksimal
2	Keamanan Informasi belum dilakukan secara optimal	Rendahnya kesadaran dan pemahaman SDM terhadap pentingnya keamanan informasi Persandian belum diposisikan sebagai fungsi strategis, melainkan hanya administratif dan simbolik	Pemahaman terhadap Keamanan Informasi dianggap hanya urusan SDM IT saja dan bukan kepentingan setiap orang/pegawai Rendahnya kesadaran terhadap ancaman keamanan informasi dari berbagai aspek seperti Password mudah ditebak, Password Sharing, membuka tautan/aplikasi/email mencurigakan dsb Prosedur/SOP/Aturan keamanan informasi belum dilaksanakan secara optimal dan disiplin oleh seluruh orang/pegawai Penggunaan infrastruktur seperti firewall dan software keamanan informasi belum optimal Terbatasnya SDM untuk melakukan pengujian keamanan (Penetration Testing, Vulnerability Assestment) terhadap Aplikasi, Sistem dan Website Pemahaman terhadap Persandian masih rendah (terbatas pada TTE), bukan merupakan sistem pertahanan informasi strategis Rendahnya kesadaran terhadap persandian sebagai pengamanan informasi rahasia atau penting sehingga rentan terhadap kebocoran informasi Belum seluruhnya Sistem Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik terintegrasi dengan Layanan Persandian (Tanda Tangan Elektronik) Belum seluruh ASN memiliki dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai bentuk pengamanan informasi
3	Pengembangan Kota Cerdas dan	Tata Kelola dan Implementas Kota	Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan Kota Cerdas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Literasi Digital belum optimal	Cerdas belum optimal	Penyelenggaraan Kota Cerdas belum berbasis dokumen perencanaan
		Literasi Digital belum optimal	Terbatasnya anggaran untuk implementasi literasi digital secara menyeluruh
			Belum semua lapisan masyarakat mendapatkan literasi digital
4	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	Infrastuktur digital yang kurang memadai (misal jaringan internet, perangkat Teknologi)
			Kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi terkait pelayanan publik
			Kurangnya koordinasi dan inisiatif perangkat daerah dalam hal penyediaan informasi
			Keterbatasan dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung (misal peralatan seperti kamera, seremonic, drone, dan lain-lain)
			Terbatasnya Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
			Minimnya anggaran Kebutuhan Pendukung Kegiatan
5	Kualitas dan tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal	Penerapan Prinsip Satu Data Belum Optimal	Kurangnya Pemahaman PD terhadap jenis kegiatan statistik
			Kurangnya Pengelola data di masing - masing Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya interoperabilitas data
		Penerapan Kualitas Data Belum Optimal	Keterlambatan Pengiriman data (Belum optimalnya aktualitas dan ketepatan waktu)
			Kualitas data belum optimal
		Penerapan Proses Bisnis Statistik dan Statistik Nasional Belum Optimal	Belum optimalnya Penyebarluasan Data
			Tingkat Literasi data Masih minim

B. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila

tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua Tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

C. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Strategi Analisa SWOT

1. Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini akan dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2025 - 2029 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja

dengan Data Center yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai syarat utama penerapan SPBE.

- b. Ketersediaan informasi publik di era keterbukaan informasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
- c. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam *West Java Smart Province* dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.
- d. Pesatnya kemampuan *hacker* dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
- e. Masih perlu adanya standar keamanan informasi dan masih menjadi program pendukung dalam tata Kelola kewanaman informasi
- f. Pesatnya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- g. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.

2. Peluang

Peluang menguntungkan berdasarkan hasil analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah:

- a. Layanan internet pada seluruh ada seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon akan diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Cirebon secara satu pintu anggaran sehingga lebih efektif dan efisien.

- b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah berupa Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran serta mengacu kepada implementasi SPBE maka Perangkat Daerah agar menghindari pengembangan dan atau pembangunan ruang server (*Data Center* maupun *Recovery Center*);
- d. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika.
- e. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- f. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.

3. KEKUATAN (Strength)

Kekuatan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Memiliki beberapa faktor yang dapat di uraikan sebagai kekuatan yang dimiliki sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Perangkat Daerah.

- a. Tersedianya Sumber daya Aparatur
- b. Tersedianya sarana dan prasara yang menunjang Perangkat Daerah
- c. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang informasi

- e. Adanya jaringan WAN sampai Titik Kecamatan dan Kelurahan
- f. Tersedianya Infrastruktur yang Memadai
- g. Semua Perangkat daerah Memiliki Perangkat TIK yang memadai
- h. Tersedianya Tenaga Instruktur bidang Kerja Komunikasi

4. KELEMAHAN (Weaknes)

Merupakan sesuatu analisis yang dimiliki Perangkat Daerah terhadap kelemahan dalam menerapkan perencanaan rencana strategis. Ada beberapa faktor yang dimiliki kelemahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cirebon diantaranya :

- a. kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah.
- b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai dengan teknologi yang semakin maju.
- c. Kurangnya koordinasi yang masih terkoordinir.
- d. Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi yang berkaitan.
- e. Pemanfaatan jaringan internet yang masih kurang optimal.
- f. Kurangnya pemanfaatan jaringan WAN di tingkat kecamatan kurang optimal.
- g. Spesifikasi perangkat TIK yang harus di tingkatkan
- h. Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah / kurang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. TUJUAN

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 37 (tiga puluh tujuh) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Domain, Aspek, Indikator Tahun 2025

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan/Penyelenggara SPBE	2
	Perencanaan dan Strategi	4
	TIK	4
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen	8
	Audit TIK	3
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan	10
	Layanan Publik	6

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat

pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses Tahun 2025

1. Rintisan	▪ Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan. ▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
2. Terkelola	▪ Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut. ▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Terstandarisasi	▪ Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut. ▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.
4. Terintegrasi dan Terukur	▪ Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut. ▪ Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.
5. Optimum	▪ Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru. ▪ Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Tabel 3.3

Kriteria Umum Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Layanan

1. Informasi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	▪ Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan 3. Transaksi menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4. Kolaborasi	▪ Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
5. Optimalisasi	▪ Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 yaitu :

- “1. Meningkatkan Kualitas sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan”

2. SASARAN

Untuk mendukung tujuan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan jumlah sasaran. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025

TUJUAN RENSTRA DISKOMINFO	SASARAN RENSTRA DISKOMINFO
1) Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	1) Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE
	2) Meningkatnya keterbukaan informasi publik
	3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
	4) Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan	5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu internal, bahwa dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan target tujuan dan sasaran. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Akhir Renstra
				Kondisi Awal						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
1	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,25	3,4	3,55	3,7	3,85	4	4
				Poin						
			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,25	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
				Poin						
			Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
				Poin						
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	80	82	84	86	90	90
				Poin						
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	2,92	2,95	3	3,1	3,2	3,3	3,3
				Poin						
		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	600	625	650	675	700	700
				Persen						
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,75	70,8	70,9	70,92	70,95	70,98	70,98
				Poin						

3. STRATEGI

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

strategi yang dianalisis menggunakan metode analisis *SWOT* yaitu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau program. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga, berdasar pada faktor internal fan faktor eksternal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut penentuan, pengambilan, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tabel 3.6.
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1	Tersedianya sumber daya aparatur	1	Kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah
2	Tersedianya sarana dan prasarana	2	Sarana dan prasarana belum memadai
3	Adanya tugas pokok dan fungsi	3	Kurangnya koordinasi
4	Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari Pemda dalam mewujudkan masyarakat informasi	4	Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi
6	Adanya jaringan intranet dan internet berbasis Fiber Optik	6	Pemanfaatan jaringan internet dan intranet yang belum optimal
7	Adanya jaringan WAN sampai titik kecamatan dan	7	Pemanfaatan jaringan WAN di tingkat

	Kelurahan		kecamatan belum optimal
8	Perangkat daerah telah memiliki infrastruktur yang memadai	8	Belum adanya kebijakan tertulis pemanfaatan infrastruktur dalam bentuk SOP
9	Hampir semua perangkat daerah memiliki perangkat TIK	9	Spesifikasi perangkat TIK yang harus ditingkatkan
10	Tersedianya tenaga instruktur bidang kerja kominfo	10	Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah/kurang
Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman/Tantangan (Threats)
1	Tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika	1	Ditetapkannya SPBE sebagai indikator kinerja daerah
2	Adanya kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia	2	Belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah
3	Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik	3	Ketersediaan informasi publik yang cepat dan mudah
4	Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai	4	Pesatnya kemampuan hacker
5	Kemampuan dan daya gunaperangkat keras semain canggih	5	Keterbatasan SDM untuk menguasai perangkat keras dan perangkat jaringan

4. ARAH KEBIJAKAN

Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya ketersediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif khususnya pada keterbukaan informasi publik. Informasi publik berpengaruh terhadap penilaian kinerja publik pada implementasi kebijakan-kebijakan daerah yang tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.7
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih Inovatif Maju Agamis Aman		
Misi IV	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Melayani, Akuntabel, dan Profesional		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Peningkatan Kualitas Tata kelola SPBE	Meningkatnya Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik
			Peningkatanya Kulaitas Layanan SPBE	Meningkatnya kualitas Layanan publik dan Pemerintahan berbasis TIK
			Peningkatan Kualitas Manajemen SPBE	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sistem pemerintahan Berbasis elektronik

		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik	Penyusunan regulasi tata kelola pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media komunikasi	Peningkatan penyebarluasan informasi publik dengan materi yang berkualitas
				Peningkatan pemantauan Opini dan Aspirasi Publik
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Penyediaan dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Elektronik dan Non Elektronik)
				Optimasi penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC 27001
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan Dinas	Peningkatan kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas
				Peningkatan ketersediaan data dan informasi Dinas
				Peningkatan kesesuaian laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan Dinas	Peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan Dinas
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar	Pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai
				Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai

Adapun keterkaitan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat dilihat pda tabel berikut.

Tabel 3.8
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

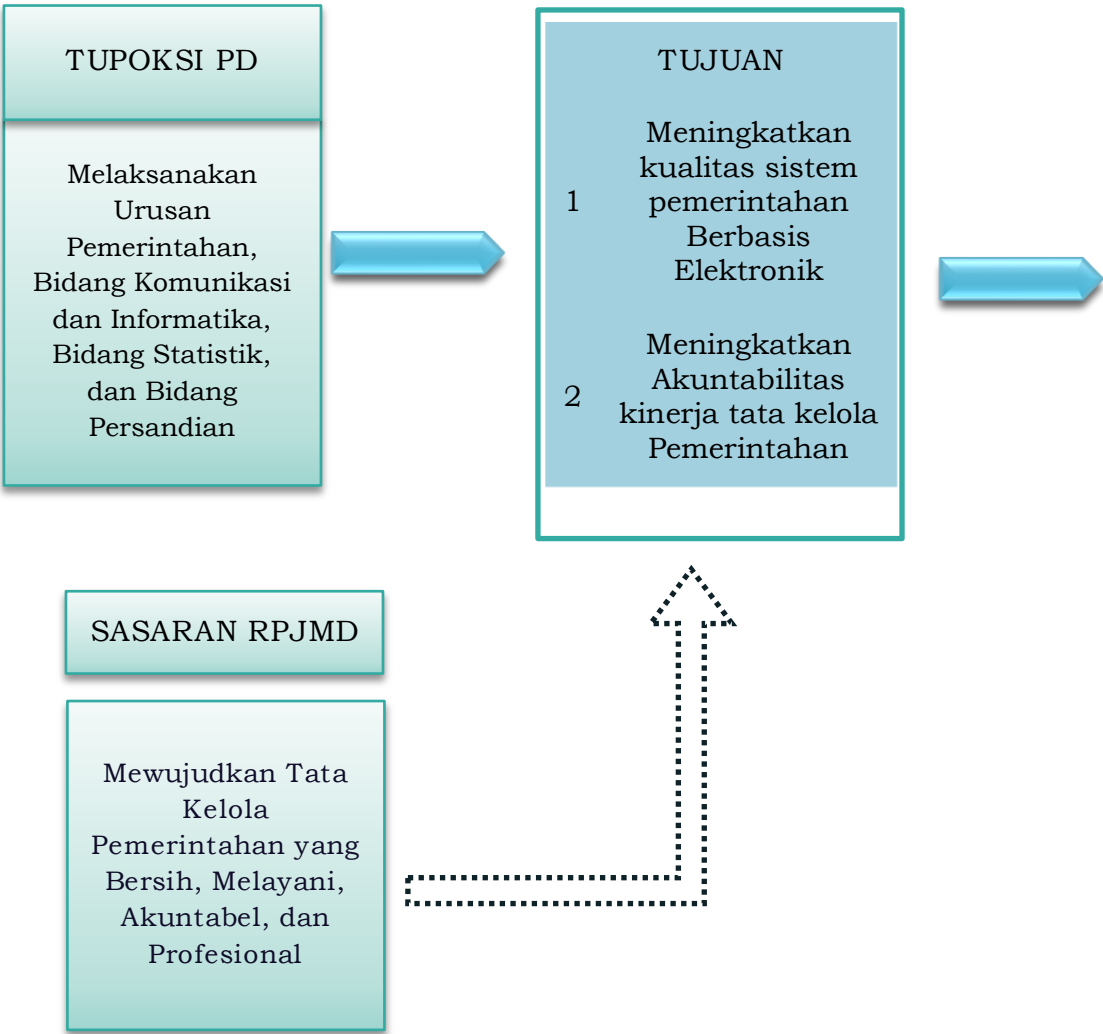
Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaan PD (IKU)	Program
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Bidang SPEGOV dan Bidang TI
				Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	
				Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Bidang IKP
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Bidang SPEGOV
			Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Bidang SPEGOV
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja tata kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan Dinas	Sekretariat

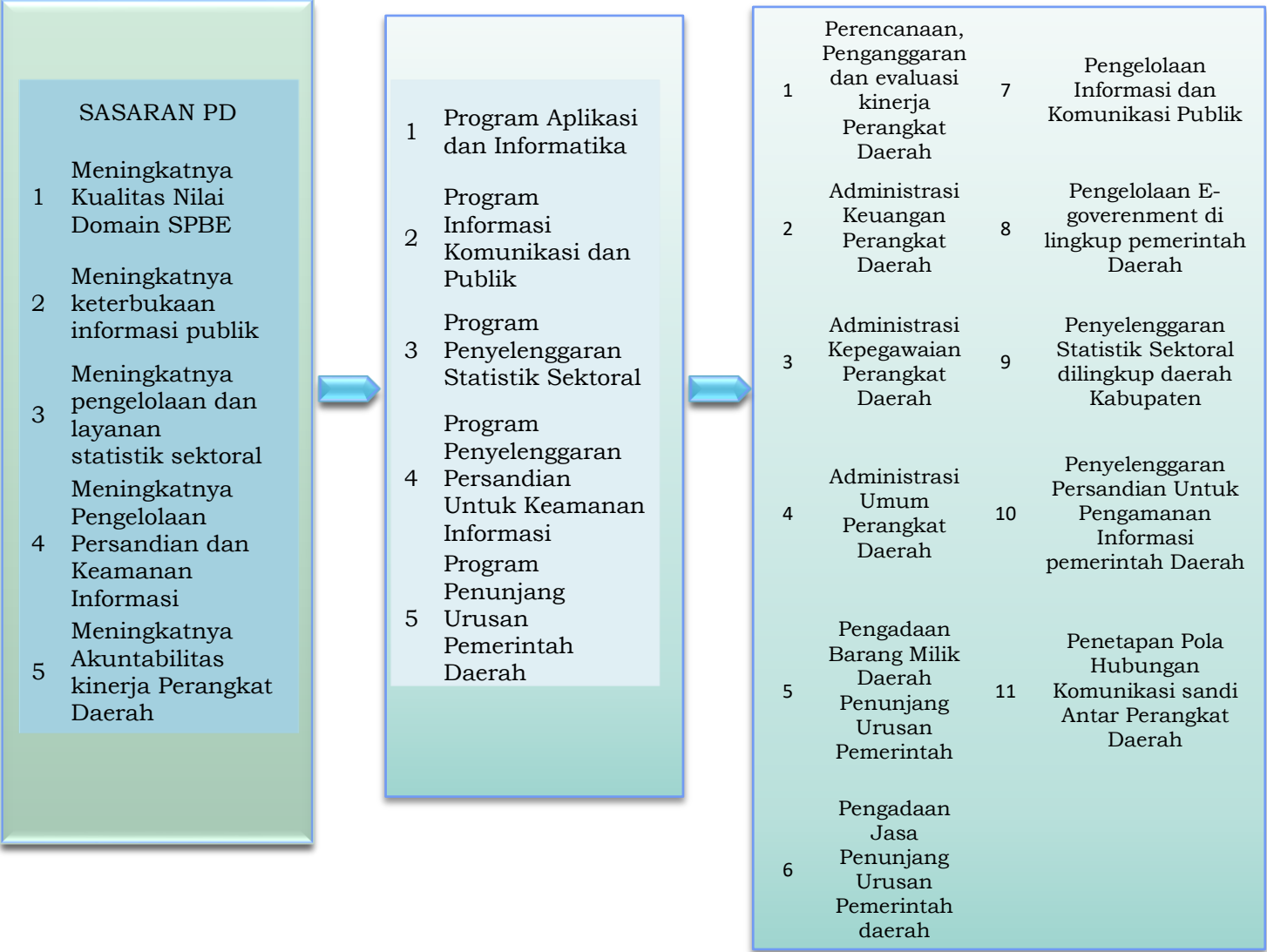
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang direncanakan untuk periode Tahun 2025–2029 selengkapny dapat dilihat pada.

Tabel 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan

Renstra Diskominfo Kabupaten Cirerbon 2025 – 2029





4.1 Uraian Program

Dalam mewujudkan capaian pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Program dan kegiatan sesuai dengan urusan penunjang, yaitu Urusan Komunikasi dan informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo kab. Cirebon. Secara hirarki terkait dengan memberikan dukungan pada capaian sasaran Bupati, capaian Program,Pemda, capaian sasaran Perangkat Daerah, serta bagaimana Proses bisnis kegiatan serta indikator Keluaran (Output) Mendukung Capaian Hasil (Outcome) Program Sesuai dengan kerangka logis RPJMD kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2029. Indikator Program Pemda dan Diskominfo dapat dijabarkan sebagai Berikut

Tabel 4.2

Program Pemda dan Idikator Pemda Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Pemda	Indikator
Mewujudkan pemerintahan Bersih	Indeks SPBE	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif, kolaboratif akuntabel dan transparan	Indeks Domain Tata Kelola	Program Cirebon Bersih	Peningkatan Pelayanan publik dan kinerja Aparatur
			indeks Domain Layanan		
			Indeks Domain Manajemen		

Tabel 4.3

Program dan Indikator Program Diskominfo Kab cirebon Tahun 2025 – 2029

Program Pemda	sasaran	Indikator sasaran	Program	Indikator Program
Program Cirebon Bersih	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	Program Aplikasi Informatika	Nilai Penyelenggaraan TIK
				Nilai Penyelenggara SPBE
		indeks Domain Layanan		Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
				Nilai Perencanaan Strategis SPBE
		Indeks Domain Manajemen		Penyelenggran pemerintahan Nilai Penerapan Manajemen SPBE
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKAS I PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo

4.2 Uraian Kegiatan

Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan 5 (Lima) Program Tersebut di jabarkan dalam 12 (DuaBelas) Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Program Aplikasi Informatika
 - I. Pengelolaan E-Govermnet dilingkup pemerintah Daerah kabupaten/ kota
- 2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - II. Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - III. Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - IV. Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - V. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi dandi Antar PD
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - VI. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
 - VII. Administrasi Keuangan PD

- VIII. Administrasi Kepegawaian PD
- IX. Admistrasi UMUM PD
- X. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang PD
- XI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
- XII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Tabel 4.4
Teknik merumuskan Program/kegiatan/subkegiatan
Resntra diskominfo kab cirebon 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	T,1	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE		
		S.1	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE		Indeks Domain Tata kelola, Indeks Domain Layanan, Indeks Domain Manajemen		
			OC,1	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola SPBE	Nilai Penyelenggaraan TIK, Nilai Penyelenggaraan SPBE, Nilai Perencanaan Strategis SPBE	Program Aplikasi Dan Informatika	
			OC,2	Meningkatnya Implementasi Layanan SPBE	Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		
			OC,3	Meningkatnya Implementasi Manajemen SPBE	Nilai Penerapan Manajemen SPBE		
			OT,1	Terlaksananya Pengelolaan E-Governmet dilingkup pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Tercapainya Target Indeks SPBE	Kegiatan Pengelolaan E-Governmet dilingkup pemerintah Daerah kabupaten/ kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
							SOT1	Terlaksananaya Koordinasi Pelakasanaan Manajeman SPBE	Tercapainya Target Nilai Domain Manajemen SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi Pelakasanaan Manajeman SPBE	
							SOT2	Terlaksananaya Penyelenggaran Pusat Kendali Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan pusat data	Sub Kegiatan Penyelenggaran Pusat Kendali Pemerintah	
							SOT3	Terlaksananaya Koordinasi Pembangunan dan/ Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencanma SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/ Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencanma SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi Umum SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT4	Terlaksananaya Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan / atau Kolaborasi penyelenggran SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/ Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencanma SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi Umum SPBE	
							SOT5	Terlaksananaya Koordinasi dan penyusunan Kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, Peta rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Pemda	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, Peta rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Pemda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT6	Terlaksananaya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			S,2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik					Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
					OC,1	Meningkatnya Desiminasi Infromasi dan Komunikasi Publik Kepada Masyarakat			prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
							OT,1	Terlaksananya Kebijakan dan Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,1	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	SubKeg. Relasi Media	
							SOT,2	Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	SubKeg. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
							SOT,3	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	SubKeg. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
							SOT,4	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	SubKeg. Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,5	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	SubKeg. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
							SOT,6	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	SubKeg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
							SOT,7	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	SubKeg. Penyusunan Konten	
							SOT,8	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	SubKeg. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
							SOT,9	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	SubKeg. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			S,3	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral					Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					OC,1	Meningkatnya Pengelolaan data Statistik Sektoral, Untuk Evaluasi Pembangunan		Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sessuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Program Statistik Sektoral		
							OT,1	Meningkatnya Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Prosentase Ketersediaan data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Kegiatan Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	
					SOT,1		Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	SubKeg. engelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		
					SOT,2		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	SubKeg. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		
					SOT,3		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	SubKeg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
					SOT,4	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	SubKeg. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
							SOT,5	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	SubKeg. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
			S,4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi					Indeks KAMI			
					OC,1	Meningkatnya Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		
								OT,1	Meningkatnya Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Capaian Indeks KAMI, CSM (Cyber Security Maturity) dan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden).	Kegiatan Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
								OT,2	Meningkatnya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi dandi Antar PD	Terlaksananya Layanan Persandian Pemerintah Daerah di Seluruh Perangkat Daerah	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi dandi Antar PD	
								SOT,1	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	SubKeg. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,2	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	SubKeg. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
							SOT,3	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	SubKeg. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
							SOT,4	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	SubKeg. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
	T,2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan							NILAI SAKIP		
			S,1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah					NILAI LKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					OC,1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						OT,1	Meningkatnya Penyusunan Dokument, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	
						SOT,1	Tersusunnya dokument Perencanaan PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						SOT,2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						SOT,3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						SOT,4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
							SOT,6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							SOT,7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							OT,2	Meningkatnya Efektifitas Pengguna Anggaran PD	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	
							SOT,1	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							SOT,2	Tersedianya Laporan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
							SOT,3	Tersedianya Laporan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub,Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
							OT,3	Meningkatnya Kinerja Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan. Administrasi Kepegawaian PD	
							SOT,1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
							OT,4	Meningkatnya Kualitas Admisnitasi UMUM	Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Admistrasi UMUM PD	
							SOT,1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							SOT,2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							SOT,3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub.Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							SOT,5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
							SOT,6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							SOT,7	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Sub.Keg Penyediaan Bahan/Material	
							SOT,8	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub.Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	
							SOT,9	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							OT,5	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang PD	
							SOT,1	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Keg. Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
							SOT,2	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							SOT,3	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							OT,6	Meningkatnya Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	
							SOT,1	Tersedianya Jasa komunikasi Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							SOT,2	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							OT,7	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
							SOT,1	terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							SOT,2	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							SOT,3	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.5
Rencana Program / kegiatan/ Sub Kegiatan/ dan Pendanaan
DISKOMINFO Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik			Indeks SPBE	3,67 Poin	3,74	16.398.500.000	3,81	18.177.000.000	3,87	20.109.200.000	3,95	22.222.720.000	4,05	24.523.005.000	4,05	101.430.425.000
	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE		Indeks Domain Tata Kelola	3,15 poin	3,2	8.150.000.000	3,25	8.965.000.000	3,3	9.861.500.000	3,35	10.847.650.000	3,4	11.932.415.000	3,4	49.756.565.000
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penyelenggaraan TIK	3,05 Poin	3,12	7.300.000.000	3,2	8.030.000.000	3,28	8.833.000.000	3,35	9.716.300.000	3,4	10.687.930.000	3,4	44.567.230.000
			Nilai Penyelenggara SPBE	3,05 Poin	3,12	500.000.000	3,2	550.000.000	3,28	605.000.000	3,35	665.500.000	3,4	732.050.000	3,4	3.052.550.000
			Nilai Perencanaan Strategis SPBE	3,3 Poin	3,35	350.000.000	3,4	385.000.000	3,45	423.500.000	3,5	465.850.000	3,6	512.435.000	3,6	2.136.785.000
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas	100 persen	100	3.800.000.000	100	4.180.000.000	100	4.598.000.000	100	5.057.800.000	100	5.563.580.000	100	23.199.380.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan pusat data	100 Persen	100	3.500.000.000	100	3.850.000.000	100	4.235.000.000	100	4.658.500.000	100	5.124.350.000	100	21.367.850.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 orang	120	500.000.000	150	550.000.000	180	605.000.000	210	665.500.000	240	732.050.000	900	3.052.550.000
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2	350.000.000	2	385.000.000	2	423.500.000	2	465.850.000	2	512.435.000	10	2.136.785.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE		Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,25 poin	4,3	1.500.000.0 00	4,35	1.650.000. 000	4,4	1.815.000. 000	4,45	1.996.500.000	4,5	2.196.150.000	4,5	9.157.650.000
		PRO GRA M APLI KASI INF ORM ATIK A	Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	4,67 Poin	4,67	1.500.000.0 00	4,67	1.650.000. 000	4,67	1.815.000. 000	4,67	1.996.500.000	4,67	2.196.150.000	4,67	9.157.650.000
		Koor dina si pem bang una n dan/ atau peng emb anga n Apli kasi Khu sus yang sesu ai deng	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	7 Aplika si	10	1.500.000.0 00	12	1.650.000. 000	14	1.815.000. 000	16	1.996.500.000	17	2.196.150.000	69	9.157.650.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		an arsit ektu r dan peta renc ana SPB E pem erint ah daer ah, serta pem anfa atan Apli kasi Umu m SPB E														
	Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE		Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2,4 Poin	2,45	350.000.000	2,5	385.000.000	2,55	423.500.000	2,6	465.850.000	2,65	512.435.000	2,65	2.136.785.000
		PRO GRAM APLI KASI	Nilai Penerapan Manajemen SPBE	2,4 Poin	2,45	350.000.000	2,5	385.000.000	2,55	423.500.000	2,6	465.850.000	2,65	512.435.000	2,65	2.136.785.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		INF ORM ATIK A														
		Peng elola an e- gove rnm ent Di Ling kup Pem erint ah Daer ah Kab upat en/K ota	Tercapainya Target Indeks SPBE	3,71 Poin	3,81	10.000.000. 000	3,91	11.000.000 .000	4	12.100.000 .000	4,1	13.310.000.000	4,2	14.641.000.000	4,2	61.051.000.000
		Koor dina si pela ksan aan Man ajem en SPB E	Tercapainya Target Nilai Domain Manajemen SPBE	2,4 Poin	2,45	350.000.000	2,5	385.000.00 0	2,55	423.500.00 0	2,6	465.850.000	2,65	512.435.000	2,65	2.136.785.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75 poin	80	4.648.500.000	82	5.252.000.000	84	5.891.700.000	86	6.583.470.000	90	7.319.830.000	90	29.695.500.000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	81 Persen	81,1	4.648.500.000	81,2	5.252.000.000	81,3	5.891.700.000	81,4	6.583.470.000	81,5	7.319.830.000	81,5	29.695.500.000
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	0 prosentase	80	4.648.500.000	81	5.252.000.000	82	5.891.700.000	83	6.583.470.000	84	7.319.830.000	84	29.695.500.000

Tuj uan		Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir	
						2026		2027		2028		2029		2030				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		en/K ota																
		Rela si Medi a	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	81 Lapora n	15	1.140.000.000	16	1.255.000.000	17	1.380.000.000	18	1.520.000.000	19	1.675.000.000	19	6.970.000.000		
		Kemi traa n Kom unik asi deng an Kom unit	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	81 Orang	360	108.500.000	360	120.000.000	360	132.000.000	360	145.200.000	360	160.000.000	360	665.700.000		

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		as Infor masi Mas yara kat														
		Duk unga n Adm inist ratif, Keua ngan , dan Tata Kelol a Kom isi Infor masi di Daer ah dala m Rang ka Peny elesa ian	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Lapora n	12	350.000.000	12	385.000.00 0	12	423.500.00 0	12	470.000.000	12	517.000.000	12	2.145.500.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Seng keta Infor masi Publ ik														
		Pela yana n Infor masi Publ ik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permo honan	12	870.000.000	12	957.000.00 0	12	1.052.700. 000	12	1.157.970.000	12	1.273.500.000	60	5.311.170.000
		Sosi alisa si Pera tura n Bida ng Infor masi dan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0 Persen tase	40	100.000.000	45	200.000.00 0	50	300.000.00 0	55	400.000.000	60	500.000.000	60	1.500.000.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kom unik asi Publ ik														
		Moni torin g Infor masi Kebij akan , Opini, dan Aspi rasi Publ ik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 Rekom endasi	12	550.000.000	12	650.000.000 0	12	750.000.000 0	12	850.000.000	12	950.000.000	60	3.750.000.000
		Peng elolan Medi a Kom unik asi Publ ik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	0 Media	2	600.000.000	2	660.000.000 0	2	726.000.000 0	2	798.600.000	2	878.460.000	10	3.663.060.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	0 Konten	300	230.000.000	325	255.000.000	350	280.500.000	375	310.000.000	400	341.000.000	1,75	1.416.500.000
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	81 Orang	50	700.000.000	60	770.000.000	70	847.000.000	80	931.700.000	90	1.024.870.000	90	4.273.570.000
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral		Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,92 poin	2,95	950.000.000	3	1.045.000.000	3,1	1.149.500.000	3,2	1.264.450.000	3,3	1.390.895.000	3,3	5.799.845.000
		PROGRAM PENYELANGARAN	Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	80 Persen	80	950.000.000	80	1.045.000.000	80	1.149.500.000	80	1.264.450.000	80	1.390.895.000	80	5.799.845.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		TISTIK SEKTORAL														
		Penyusunan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	80 Persen	85	950.000.000	85	1.045.000.000	90	1.149.500.000	95	1.264.450.000	100	1.390.895.000	100	5.799.845.000
		Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	0 %	50	250.000.000	60	275.000.000	65	302.500.000	70	332.750.000	80	366.025.000	80	1.526.275.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		m Siste m Stati stik Nasi onal														
		Peni ngka tan Kual itas Stati stik Sekt oral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	0 %	60	300.000.000	65	330.000.00 0	70	363.000.00 0	75	399.300.000	80	439.230.000	80	1.831.530.000
		Peng ingk atan Kapa sitas Kele mba gaan Stati stik Sekt oral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	80	100.000.000	120	110.000.00 0	120	121.000.00 0	120	133.100.000	120	146.410.000	560	610.510.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pela ksan aan Pro ses Bisn is Stati stik Sekt oral Sesu ai Stan dar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	0 %	60	200.000.000	70	220.000.00 0	80	242.000.00 0	90	266.200.000	100	292.820.000	100	1.221.020.000
		Koor dina si dan Kola bora si Dala m Peny elen ggar aan Stati stik Sekt oral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0 Lapora n	4	100.000.000	4	110.000.00 0	4	121.000.00 0	4	133.100.000	4	146.410.000	20	610.510.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi		Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.5	550 Poin	600	800.000.000	625	880.000.00 0	650	968.000.00 0	675	1.064.800.000	700	1.171.280.000	700	4.884.080.000
		PRO GRA M PEN YEL ENG GAR AAN PER SAN DIA N UNT UK PEN GAM ANA N INF ORM ASI	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	2,8 Poin	3	800.000.000	3,2	880.000.00 0	3,4	968.000.00 0	3,6	1.064.800.000	3,8	1.171.280.000	3,8	4.884.080.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peny elen ggar aan Pers andi an Untu k Peng ama nan Infor masi Pem erint ah Daer ah Kab upat en/K ota	Meningkatnya Capaian Indeks KAMI, CSM (Cyber Security Maturity) dan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden).	1 Layan an	3	650.000.000	3	715.000.00 0	3	786.500.00 0	3	865.150.000	3	951.665.000	3	3.968.315.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peng elola an Sum ber Daya Kea man an Infor masi dan Pers andi an Pem erint ah Daer ah berd asar kan Anal isis Keb utuh an	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	0 orang	15	150.000.000	15	165.000.00 0	15	181.500.00 0	15	199.650.000	15	219.615.000	75	915.765.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	0 Poin	600	350.000.000	625	385.000.000 0	650	423.500.000 0	675	465.850.000	700	512.435.000	700	2.136.785.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pene tapa n Kebij akan Tata Kelol a Kea man an Infor masi dan Pers andi an Pem erint ah Daer ah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 Doku men	2	150.000.000	2	165.000.00 0	2	181.500.00 0	2	199.650.000	2	219.615.000	2	915.765.000
		Pene tapa n Pola Hub unga n Kom unik asi San	Terlaksananya Layanan Persandian Pemerintah Daerah di Seluruh Perangkat Daerah	100 Persen	100	150.000.000	100	165.000.00 0	100	181.500.00 0	100	199.650.000	100	219.615.000	100	915.765.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		di Anta r Pera ngka t Daer ah Kab upat en/K ota														
		Oper asio nalis asi Laya nan Kea man an Infor masi dan Pers andi an Pem erint ah Daer ah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	0 Persen tase	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	100	915.765.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan			Nilai SAKIP	68,5 Nilai	69,2	12.080.000.000	69,5	13.288.000.000	70	14.616.800.000	70,5	16.078.480.000	71	17.686.328.000	350,2	73.749.608.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai LKIP	75,75 Nilai	75,8	12.080.000.000	75,85	13.288.000.000	75,9	14.616.800.000	75,95	16.078.480.000	76	17.686.328.000	76	73.749.608.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	90,5 poin	90,6	12.080.000.000	90,7	13.288.000.000	90,8	14.616.800.000	90,85	16.078.480.000	90,9	17.686.328.000	90,9	73.749.608.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	0 Dokumen	11	500.000.000	11	550.000.000	11	605.000.000	11	665.500.000	11	732.050.000	11	3.052.550.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000	4	199.650.000	3	219.615.000	16	915.765.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000

Tuj uan	Sasa ran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondi si Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11	100.000.000	11	110.000.000	11	121.000.000	11	133.100.000	11	146.410.000	55	610.510.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0 Laporan	12	7.730.000.000	12	8.503.000.000	12	9.353.300.000	12	10.288.630.000	12	11.317.493.000	12	47.192.423.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	50	7.500.000.000	52	8.250.000.000	54	9.075.000.000	56	9.982.500.000	58	10.980.750.000	270	45.788.250.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SKPD														
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	5	183.153.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	18 Laporan	18	50.000.000	18	55.000.000	18	60.500.000	18	66.550.000	18	73.205.000	90	305.255.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			nan/Semesteran SKPD													
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Laporan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Stel	65	75.000.000	65	82.500.000	68	90.750.000	68	99.825.000	70	109.807.500	70	457.882.500
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	60 stel	65	75.000.000	65	82.500.000	68	90.750.000	68	99.825.000	70	109.807.500	70	457.882.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan	9	510.000.000	9	561.000.000	9	617.100.000	9	678.810.000	9	746.691.000	9	3.113.601.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Buah	60	15.000.000	70	16.500.000	80	18.150.000	90	19.965.000	100	21.961.500	100	91.576.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10	175.000.000	10	192.500.000	15	211.750.000	15	232.925.000	20	256.217.500	20	1.068.392.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24	50.000.000	24	55.000.000	24	60.500.000	24	66.550.000	24	73.205.000	24	305.255.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1	183.153.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	12	43.923.000	12	183.153.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Paket	14	30.000.000	14	33.000.000	14	36.300.000	14	39.930.000	14	43.923.000	14	183.153.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	48	70.000.000	48	77.000.000	48	84.700.000	48	93.170.000	48	102.487.000	48	427.357.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11	10.000.000	11	11.000.000	11	12.100.000	11	13.310.000	11	14.641.000	11	61.051.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	210	100.000.000	220	110.000.000	230	121.000.000	240	133.100.000	250	146.410.000	250	610.510.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang disediakan	0 Jenis	10	1.100.000.000	15	1.210.000.000	20	1.331.000.000	25	1.464.100.000	30	1.610.510.000	30	6.715.610.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	5	665.500.000	5	732.050.000	25	3.052.550.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	5	665.500.000	5	732.050.000	25	3.052.550.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Jenis	10	100.000.000	15	110.000.000	20	121.000.000	25	133.100.000	30	146.410.000	30	610.510.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 Layanan	2	1.100.000.000	2	1.210.000.000	2	1.331.000.000	2	1.464.100.000	2	1.610.510.000	2	6.715.610.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Layanan	3	700.000.000	3	770.000.000	3	847.000.000	3	931.700.000	3	1.024.870.000	3	4.273.570.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 layanan	2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	2	532.400.000	2	585.640.000	2	2.442.040.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	5 Unit	10	1.065.000.000	15	1.171.500.000	20	1.288.650.000	25	1.417.515.000	30	1.559.266.500	30	6.501.931.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	12	14.641.000	60	61.051.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
					2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	30.525.500
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	36	50.000.000	36	55.000.000	36	60.500.000	36	66.550.000	36	73.205.000	36	305.255.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	2	1.000.000.000	2	1.100.000.000	2	1.210.000.000	2	1.331.000.000	2	1.464.100.000	2	6.105.100.000
JUMLAH						28.478.500.000		31.465.000.000		34.726.000.000		38.301.200.000		42.209.333.000		175.180.033.000

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Poin	3,74	3,81	3.87	3.95	4.05
1.1.1.		Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	Poin	3,20	3,25	3,30	3,35	3.40
			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50
			Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65
1.1.2.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	80	82,00	84,00	86,00	90,00
1.1.3.		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,95	3,00	3,10	3,20	3,30
1.1.4.		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) V.5	Persen	600	625	650	675	700
1.2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	69.2	69.5	70	70.5	76
1.2.1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	Nilai	75.8	75.85	75.90	75.95	76

4.3 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan Pemerintah Merupakan gambaran dan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Tentang pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja. Urusan pemerintah daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan masing-masing indikatornya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut tabel 4.7 adalah target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Urusan Komunikasi dan informatika							
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75%	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	87%	88%	90%	91%	92%	93%
II	Urusan Statistik							
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Urusan Persandian							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75%	75%	80%	85%	85%	90%

* Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Diskominfo Kab.cirebon

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Cirebon merupakan produk perencanaan 5 (lima) Tahunan yang bersifat dinamis dan mengacu kepada visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RENSTRA Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan penyusunan rencana kerja Tahunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam RENSTRA ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon. Keberhasilan tujuan, sasaran dan capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak di seluruh tingkatan dalam unit kerja Diskominfo Kabupaten Cirebon guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan agar Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon



BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19781024 200604 1 015

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Cirebon merupakan produk perencanaan 5 (lima) Tahunan yang bersifat dinamis dan mengacu kepada visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RENSTRA Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan penyusunan rencana kerja Tahunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam RENSTRA ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon. Keberhasilan tujuan, sasaran dan capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak di seluruh tingkatan dalam unit kerja Diskominfo Kabupaten Cirebon guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan agar Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon.

DI tetapkan di Sumber
Pada Tanggal

BUPATI CIREBON

TTD

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal

I M R O N

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
HILMY RIVAI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR SERI